

SKRIPSI

FRAMING REVISI UU PILKADA 2024 DI MEDIA ONLINE: STUDI MEDIA KOMPAS.COM DAN TVONENEWS

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

AHSANUL AMAL

2106016124

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: 5 (lima)

Perihal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan catatan, dan meminta perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara

Nama : Ahsanul Amal

NIM : 2106016124

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : “**Framing Revisi UU Pilkada 2024 di Media Online: Studi Media Kompas.com dan tvOneNews**”

Dengan ini saya telah menyetujui dan memohon agar dapat segera diujikan. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 21 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Framing Revisi UU Pilkada 2024 di Media Online: Studi Media Kompas.com dan tvOneNews

Disusun oleh

Ahsanul Amal

2106016124

Telah dipertahankan di depan dewan pengaji skripsi pada tanggal 12 Juni 2025 dan
telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Pengaji:



Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si.

NIP. 198505022019031007

Pengaji

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.

NIP. 196805051995031002

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 198511182016011901

Pembimbing

Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si.

NIP. 198505022019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Ahsanul Amal menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Framing Revisi UU Pilkada 2024 di Media Online: Studi Media Kompas.com dan tvOneNews" adalah hasil penggerjaan saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ataupun di perguruan tinggi lainnya. Referensi-referensi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam penulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2025

Yang Menyatakan



Ahsanul Amal

2106016124

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Framing Revisi UU Pilkada di Media Online: Studi Media Kompas.com dan tvOneNews". Shalawat serta salam juga tidak lupa penulis aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir.

Berakhirnya penulisan skripsi ini, penulis anggap sebagai suatu pencapaian yang luar biasa bagi penulis. Selain itu, skripsi ini merupakan hasil akhir selama proses perkuliahan sebagai seorang mahasiswa sarjana. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang membantu selama proses pembelajaran dan penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu menjadi penyemangat dan alasan saya kuat. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Agus Dwi Setiarjo dan Ibu Mas'adah yang selalu berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik untuk penulis serta adik saya Anan Hafidzhan yang selalu percaya pada kakaknya.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M. Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Yahya, M. Ag. yang telah memberikan kesempatan penulis untuk

menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

4. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang sekaligus dosen pembimbing penulis, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M. Si. yang telah membimbing, memberikan arahan, dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan proses pengembangan skripsi.
5. Bapak/Ibu yang ikut memberikan masukan terhadap skripsi saya, Ibu Nafisah, M.A selaku dosen pembimbing sebelum seminar proposal. Ibu Masrohatun, M.Si., Ibu Tika Ifrida Takayasa, M.A., Bapak Nur Syamsudin, M.A., dan Bapak Mahsun, M.A. selaku dosen penguji seminar proposal. Bapak Marakhilda NH Siregar, Bapak Muhammad Faqih Irsyad, dan Ibu Zainurrahmah yang telah memberi masukan kepada penulis.
6. Wali dosen paling oke, Bapak Moh. Yamin Darsyah, M.Sc. yang selalu memberikan motivasi selama masa perwalian.
7. Bapak/Ibu Dosen, dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan serta membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar penulis, keluarga Bani Suratmo dan Bani Zuhri yang selalu ada bagi penulis.
9. Teman istimewa NMN, terima kasih telah hadir di situasi yang sempat kacau balau.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah menemani selama perkuliahan dan memberikan dukungan kepada penulis, Rifqi, Aldian, Hafidz, Ridwan, Yassa, Wahyu, Akmal, Alvin, Aldito, Sherley, Shaqila, Laviota, dan Afif, terima kasih sudah memberikan warna kehidupan perkuliahan penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis sejak SMA, Eno, Nathan, Fian, Edo, Drian, Nizar, Dhea, Akbar, Zidan, Bambang, Huda, Jiddan, dan Nurulhuda, terima kasih masih bertahan dalam pertemanan ini.

12. Penghuni Posko 12 KKN MIT ke-19, terima kasih atas ketulusan yang diberikan dalam pertemanan ini dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ikatan pertemanan ini akan terus terjalin selamanya dan sukses untuk kalian semua.
13. Untuk saya sendiri, terima kasih telah berusaha dan berjuang sampai akhir. Penghargaan setinggi-tingginya karena telah menyelesaikan meskipun banyak halangan dan rintangan. Terima kasih dan tetap semangat karena selesai skripsi masih banyak karya yang harus kau selesaikan.

Semarang, 21 Mei 2025



Ahsanul Amal

2106016124

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayah kepada Allah SWT. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Dwi Setiarjo dan Ibu Mas'adah yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga dan tulus dalam membesarkan saya. Untuk ibu yang selalu mengirimkan do'a dan selalu memberikan kehangatan setiap hari meskipun terpisah jarak. Untuk bapak yang selalu menjadi pendorong dalam hidup dan selalu menjadi kritikus skripsi ini. Untuk keduanya yang selalu berusaha dan ikhlas demi memberikan semua yang dibutuhkan anak-anaknya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu yang telah mempercayai dan mendukung anakmu sampai saat ini. Semoga terus mendampingi sampai anakmu dapat gelar Doktor Ilmu Politik.

MOTTO

“Hidup harus terus berjalan..”

“Semua itu akan berlalu, kalau lagi gembira, senangnya jangan berlebihan, kalau lagi kecewa, sedihnya jangan berlebihan.”

ABSTRAK

Polemik revisi UU Pilkada 2024 telah memicu perdebatan publik yang cukup luas. Dalam konteks ini, media online ikut berperan penting dalam membentuk persepsi publik melalui konstruksi pemberitaan yang mereka sajikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua media online arus utama di Indonesia, yaitu Kompas.com dan tvOneNews.com dalam membingkai wacana revisi UU Pilkada 2024. Melalui teori framing Robert Entman sebagai kerangka analisis, penelitian ini akan melihat kedua media tersebut mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, membuat penilaian moral, dan memberikan rekomendasi atas fenomena RUU Pilkada 2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing. Data dikumpulkan melalui dokumentasi sejumlah artikel berita dan konten berita yang dipublikasikan oleh kedua media dalam kurun waktu 20 Agustus-19 September 2024. Data yang dianalisis adalah artikel dan konten berita yang telah diseleksi dan dipetakan berdasarkan periode pemberitaan. Ketiga periode tersebut adalah periode awal kemunculan, periode puncak ketegangan, dan periode pasca pembatalan pengesahan polemik RUU Pilkada 2024.

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan dalam framing kedua media tersebut. Media Kompas.com menunjukkan pembingkai yang kritis dengan lebih banyak menampilkan suara-suara kritis dari pihak oposisi, akademisi, dan elemen masyarakat sipil. Berbeda dengan Kompas.com, tvOneNews.com menunjukkan pembingkai yang lebih netral dan prosedural. Pemberitaan tvOneNews berimbang dalam menyajikan pernyataan dari pihak pemerintah dan oposisi. Temuan ini membantu melihat konstruksi realitas yang berusaha kedua media tersebut ciptakan. Berdasarkan framing pemberitaannya, Kompas.com berusaha mengonstruksi realitas bahwa RUU Pilkada merupakan ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Berbeda dengan Kompas.com, tvOneNews berusaha mengonstruksi realitas bahwa RUU Pilkada merupakan perbedaan tafsir MA dan MK serta bagian dari proses dinamika politik.

Konstruksi realitas dalam pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024 dapat diartikan sebagai cerminan posisi ideologi dan orientasi masing-masing media.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi analisis *framing* dengan menerapkan model teori Robert Entman secara komprehensif dalam konteks pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024. Melalui perbandingan media Kompas.com dan tvOneNews pada tiga periode penting pemberitaan, penelitian ini menunjukkan bagaimana media mengkonstruksi realitas politik melalui framing yang kedua media ciptakan. Kontribusi ini memperkuat pemahaman bahwa pembingkaian media bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perkembangan situasi sosial-politik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, penelitian ini hanya menganalisis dua media online. Kedua, pendekatan yang digunakan mengacu pada analisis framing model Entman dengan fokus pada empat elemen framing.

Kata Kunci: *Framing, Media Online, Kompas.com, tvOneNews, Konstruksi Realitas.*

ABSTRACT

The polemics over the revision of the 2024 Pilkada Law have sparked considerable public debate. In this context, online media plays an important role in shaping public perception through the construction of the news they present. This study aims to analyze two mainstream online media in Indonesia, namely Kompas.com and tvOneNews.com in framing the discourse on the revision of the 2024 Pilkada Law. Through Robert Entman's framing theory as an analytical framework, this research will see the two media defining the problem, identifying causes, making moral judgments, and providing recommendations on the phenomenon of the 2024 Pilkada Bill.

The research method used is qualitative research with a framing analysis approach. Data was collected through documentation of a number of news articles and news content published by both media in the period August 20-September 19, 2024. The data analyzed were news articles and content that had been selected and mapped based on the reporting period. The three periods are the initial period of emergence, the peak period of tension, and the period after the cancellation of the ratification of the 2024 Pilkada Bill polemic.

The results showed that there were differences in the framing of the two media. Kompas.com shows a critical framing by featuring more critical voices from the opposition, academics, and elements of civil society. In contrast to Kompas.com, tvOneNews.com shows a more neutral and procedural framing. The tvOneNews coverage is balanced in presenting statements from the government and opposition parties. This finding helps to see the construction of reality that the two media are trying to create. Based on its news framing, Kompas.com tries to construct the reality that the Pilkada Bill is a threat to the principles of democracy and the constitution. In contrast to Kompas.com, tvOneNews tries to construct the reality that the Pilkada Bill is a difference in interpretation between the Supreme Court and the Constitutional Court and part of the process of political dynamics. The construction of reality in the polemical

coverage of the 2024 Pilkada Bill can be interpreted as a reflection of the ideological position and orientation of each media.

This research can contribute to the development of framing analysis studies by applying Robert Entman's theoretical model comprehensively in the context of the polemical coverage of the 2024 Pilkada Bill. Through the comparison of Kompas.com and tvOneNews media in three important periods of news coverage, this research shows how the media constructs political reality through the framing that both media create. This contribution strengthens the understanding that media framing is dynamic and influenced by the development of socio-political situations. There are two limitations in this research. First, this research only analyzes two online media. Second, the approach used refers to Entman's framing analysis model with a focus on four framing elements.

Keywords: **Framing, Online Media, Kompas.com, tvOneNews, Reality Construction.**

DAFTAR ISI

JUDUL

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
1. Portal Berita Online.....	6
2. Situs Youtube	8
E. Metode Penelitian.....	9

1.	Jenis dan Pendekatan.....	9
2.	Sumber dan Jenis Data	10
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	12
4.	Teknik Analisis Data.....	13
5.	Validitas Data.....	15
F.	Sistematika Penulisan	16
BAB II		18
TEORI ANALISIS <i>FRAMING</i> ROBERT ENTMAN		18
A.	Definisi Konseptual	18
1.	Media <i>Online</i>	18
2.	<i>Framing</i>	18
3.	Media dan Politik	19
4.	Ideologi Media	20
B.	Teori Penelitian	21
1.	Teori Analisis <i>Framing</i> Robert M. Entman	21
BAB III		25
GAMBARAN UMUM KOMPAS.COM DAN TVONENEWS.....		25
A.	Media Kompas.com.....	25
1.	Sejarah Kompas.com.....	25
2.	Struktur Kepengurusan Kompas.com	26
3.	Jenis-Jenis Media Kompas	30
B.	Media tvOneNews	32
1.	Sejarah tvOneNews	32
2.	Struktur Kepengurusan tvOneNews	34

3.	Jenis-Jenis Media tvOne.....	35
BAB IV		37
FRAMING YANG DICIPTAKAN OLEH MEDIA KOMPAS.COM DAN TVONENEWS TERKAIT BERITA DINAMIKA RUU PILKADA	37	
A. Konteks Sosial dan Politik Pemberitaan RUU Pilkada 2024	38	
1. Latar Belakang RUU Pilkada 2024	38	
B. Analisis <i>Framing</i> Artikel Berita Kompas.com terkait RUU Pilkada 2024	39	
1. Pola Pemberitaan Kompas.com dalam Menyikapi RUU Pilkada 2024	42	
2. Elemen-Elemen <i>Framing</i> Pemberitaan RUU Pilkada 2024 Media Kompas.com	45	
C. Analisis <i>Framing</i> Konten Berita tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024	59	
1. Pola Pemberitaan tvOneNews dalam Menyikapi RUU Pilkada 2024	62	
2. Elemen-Elemen <i>Framing</i> Pemberitaan RUU Pilkada 2024 Media tvOneNews	65	
D. Perbandingan Konstruksi <i>Framing</i> Media Kompas.com dan tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024.....	78	
1. <i>Framing</i> Artikel Berita Kompas.com terkait RUU Pilkada 2024.....	78	
2. <i>Framing</i> Konten Berita tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024.....	81	
3. Perbedaan Framing Kompas.com dan tvOneNews	82	
BAB V		85
KONSTRUKSI REALITAS POLEMIK RUU PILKADA OLEH KOMPAS.COM DAN TVONENEWS	85	
A. Konstruksi Realitas Media Kompas.com dan tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024	86	

1. Konstruksi Realitas Artikel Berita Kompas.com terkait RUU Pilkada 2024.....	86
2. Konstruksi Realitas Konten Berita tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024	88
B. Perbandingan Konstruksi Realitas Kompas.com dan tvOneNews dalam Pemberitaan RUU Pilkada 2024.....	91
1. Perbedaan Konstruksi Realitas Media Kompas.com dan tvOneNews dalam Framing RUU Pilkada 2024	92
BAB VI.....	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Elemen Framing Model Entman	14
Tabel 4. 1 Daftar Artikel Berita Kompas.com Terpilih.....	39
Tabel 4. 2 Daftar Konten Berita tvOneNews Terpilih.....	60
Tabel 4. 3 Aspek <i>Framing</i> Artikel Berita Kompas.com Periode Awal.....	78
Tabel 4. 4 Aspek <i>Framing</i> Artikel Berita Kompas.com Periode Puncak.....	79
Tabel 4. 5 Aspek <i>Framing</i> Artikel Berita Kompas.com Periode Pasca Pembatalan Pengesahan	80
Tabel 4. 6 Aspek <i>Framing</i> Konten Berita tvOneNews Periode Awal.....	81
Tabel 4. 7 Aspek <i>Framing</i> Konten Berita tvOneNews Periode Puncak	81
Tabel 4. 8 Aspek <i>Framing</i> Konten Berita tvOneNews Periode Pasca Pembatalan Pengesahan	82
Tabel 4. 9 Aspek <i>Framing</i> Konten Berita tvOneNews	83
Tabel 4. 10 Aspek <i>Framing</i> Konten Berita tvOneNews	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Artikel Berita Kompas.com Ketiga	43
Gambar 4. 2 Artikel Berita Kompas.com Kesepuluh.....	44
Gambar 4. 3 Artikel Berita Kompas.com Kesembilan.....	44
Gambar 4. 4 Artikel Berita Kompas.com Kelima	46
Gambar 4. 5 Artikel Berita Kompas.com Kedelapan.....	47
Gambar 4. 6 Artikel Berita Kompas.com Ketiga Belas	47
Gambar 4. 7 Artikel Berita Kompas.com Keempat	50
Gambar 4. 8 Artikel Berita Kompas.com Kesebelas.....	51
Gambar 4. 9 Artikel Berita Kompas.com Keempatbelas	52
Gambar 4. 10 Artikel Berita Kompas.com Kedua.....	53
Gambar 4. 11 Artikel Berita Kompas.com Ketujuh	54
Gambar 4. 12 Artikel Berita Kompas.com Ketujuhbelas	55
Gambar 4. 13 Artikel Berita Kompas.com Pertama.....	57
Gambar 4. 14 Artikel Berita Kompas.com Kelima Belas	57
Gambar 4. 15 Artikel Berita Kompas.com Keenam Belas.....	58
Gambar 4. 16 Konten Berita tvoneNews Keempat	63
Gambar 4. 17 Konten Berita tvOneNews Kedelapan Belas.....	63
Gambar 4. 18 Konten Berita tvOneNews Kesembilan.....	64
Gambar 4. 19 Konten Berita tvOneNews Keenam	66
Gambar 4. 20 Konten Berita tvOneNews Ketujuh	66
Gambar 4. 21 Konten Berita tvOneNews Kelima Belas	67
Gambar 4. 22 Konten Berita tvOneNews Pertama.....	68
Gambar 4. 23 Konten Berita tvOneNews Kesebelas.....	69
Gambar 4. 24 Konten Berita tvOneNews Keenam Belas.....	70
Gambar 4. 25 Konten Berita tvOneNews Ketiga	72
Gambar 4. 26 Konten Berita tvOneNews Kedelapan.....	72
Gambar 4. 27 Konten Berita tvOneNews Ketiga Belas	73

Gambar 4. 28 Konten Berita tvOneNews Keempat Belas.....	73
Gambar 4. 29 Konten Berita tvOneNews Kelima	75
Gambar 4. 30 Konten Berita tvOneNews Kedua Belas.....	76
Gambar 4. 31 Konten Berita tvOneNews Ketujuh Belas	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Link Artikel Berita Kompas.com.....	104
Lampiran 2 Link Konten Berita tvOneNews.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya internet menjadi alternatif media dalam melakukan penyebaran informasi, yakni melalui media *online*. Bentuk-bentuk media online juga terdapat beberapa jenis seperti portal berita, situs website, dan media sosial. Media-media massa konvensional juga ikut tren saat ini dengan menggabungkan media konvensionalnya dengan portal berita *online*. Media konvensional juga menggabungkan medianya dalam bentuk konten berita melalui situs website Youtube. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga eksistensi medianya (Maylani & Nugroho, 2023). Media *online* bertransformasi menjadi media yang berpengaruh dalam membentuk opini publik melalui informasi yang disampaikan (Puspianto, 2022). Salah satu topik yang menarik di media online adalah polemik revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada tahun 2024.

RUU Pilkada menjadi perbincangan menjelang Pilkada 2024. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengubah UU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan batas usia pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Akan tetapi, putusan MA dan MK saling berlawanan. Pada tanggal 29 Mei 2024, MA mengeluarkan putusan nomor 23 P/HUM/2024. Putusan tersebut mengatur batas minimum usia untuk gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun saat dilantik (MAHKAMAH AGUNG, 2024). Berbeda dengan putusan MA, MK memutuskan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia 30 tahun saat ditetapkan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut termuat dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 (MAHKAMAH KONSTITUSI, 2024).

Perbedaan putusan antara MA dan MK direspon oleh DPR dalam bentuk RUU Pilkada 2024. Akan tetapi, DPR justru lebih memilih putusan MA daripada putusan MK. Isi bagian draft RUU Pilkada 2024 yang membahas

mengenai batasan usia pencalonan gubernur dan wakil gubernur mengacu pada putusan MA dan mengabaikan putusan MK. Hal tersebut menunjukan adanya pelemahan *check and balances* antar lembaga negara (Umam et al., 2023). Jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pasal 24 C, MK berwenang menguji undang-undang berkaitan Pilkada dan putusan MK sudah bersifat final dan mengikat. Maka dari itu, sikap DPR yang berusaha menyabotase putusan MK membuat kesan yang tidak mencerminkan *check and balances*. DPR terlihat mengintervensi dan bukan dalam kerangka saling mengawasi.

Selain perbedaan isi dengan putusan MK, hal lain yang disorot dalam polemik RUU Pilkada 2024 adalah proses legislasi. Instrumen legislasi dilihat sebagai bentuk perlawanan politik DPR terhadap putusan MK. Proses legislasi dalam RUU Pilkada 2024 dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Proses legislasi terkesan diburu-buru karena mekanismenya yang kebut semalam. Dalam proses legislasi, banyak aktor politik seperti partai politik, anggota DPR, dan pemerintah yang memiliki pengaruh dalam menentukan regulasi yang akan dibuat (Suhanda et al., 2024). Ada indikasi kekuatan politik yang besar merancang RUU Pilkada 2024. Anggota-anggota DPR yang mayoritasnya kader partai koalisi pemerintah merupakan bagian dari kekuatan politik tersebut. RUU Pilkada dianggap sebagai alat untuk melanggengkan dinasti politik Jokowi. Oleh karena itu, terjadi penolakan terhadap isi draft RUU Pilkada yang dianggap menguntungkan aktor-aktor politik tertentu.

Penolakan terhadap *draft* RUU Pilkada berkembang menjadi sebuah gerakan protes. *Draft* RUU Pilkada dianggap mencederai demokrasi dan tidak mematuhi putusan MK. Protes terhadap *draft* RUU Pilkada terjadi di dunia nyata (demonstrasi langsung) maupun dunia maya (perlawanan di media online). Media online melalui platform portal berita dan situs youtube mempunyai peran penting karena memberitakan isu tersebut. Selain itu, media *online* dapat dikatakan berperan sebagai aktor politik. Hal ini dikarenakan media dapat membentuk opini publik dengan menahan atau mengeluarkan isu yang merugikan maupun menguntungkan aktor politik lain melalui pemberitaan, baik

di portal berita maupun konten berita youtube (Herianto & Lutfi, 2020). Pemberitaan yang dilakukan media-media pastinya memiliki pembingkaian (*framing*) berita sesuai wartawan maupun medianya (Nurhayati et al., 2024).

Framing menjadi cara untuk melihat media bercerita atau memaknai suatu peristiwa yang terjadi. Cara melihat tersebut akan berpengaruh pada hasil kenyataan yang sudah dibentuk (Eriyanto, 2012). Analisis *framing* adalah sebuah alat untuk melihat sejauh mana media membentuk atau membangun sebuah kenyataan (Eriyanto, 2012). Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis *framing* dapat melihat bagaimana media memahami sebuah peristiwa dan bagaimana media akan menciptakan *framing* tentang peristiwa itu sendiri. Analisis *framing* terhadap penyampaian informasi dinamika RUU Pilkada menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai alat untuk melihat pembingkaian media dalam menceritakan fenomena tersebut.

Berbagai penelitian berkaitan *framing* pemberitaan telah dilakukan sebelumnya. *Framing* dalam pemberitaan media seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, dan kepentingan pemiliknya (Wibisono, 2024). Misal, dalam *framing* pemberitaan dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2020 yang dilakukan oleh kompas.com dan okezone.com. Framing pemberitaan yang dilakukan kompas.com menonjolkan ketidaksetujuannya dengan adanya politik dinasti. Akan tetapi, dalam pemberitaan okezone.com terlihat tidak mempermasalahkan hal tersebut (Aziz & Wahid, 2021). Adanya *framing* pemberitaan yang tidak berimbang dan berpihak pada salah satu pihak dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dan dapat mempengaruhi sikap masyarakat (Siagian & Ritonga, 2024).

Penelitian sebelumnya dalam memilih topik pembahasan cenderung membahas mengenai kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah seperti dilakukan oleh (Hidayah & Riauan, 2022); (Fauziati, 2021); (Putri & Qurniawati, 2024); dan (Ramadhan et al., 2023). Peneliti sebelumnya lebih banyak meneliti bagaimana *framing* media terkait implementasi kebijakan atau peran pemerintah terkait suatu fenomena dan masih sedikit yang meneliti

bagaimana *framing* pemberitaan polemik kebijakan yang akan disahkan. Posisi penelitian ini akan berusaha mengkaji bagaimana media mengonstruksi framing dan realitas berkaitan pemberitaan berkaitan kebijakan yang masih dirancang. Penelitian ini akan berfokus bagaimana media online membungkai pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024.

Dalam observasi singkat yang dilakukan penulis, pemberitaan mengenai polemik RUU Pilkada masif diberitakan di berbagai platform media *online*. Platform media *online* seperti portal berita online, situs youtube, dan media sosial instagram memberitakan mengenai polemik RUU Pilkada 2024. Media-media *online* tersebut mengemas *framing* pemberitaan terkait polemik RUU Pilkada dengan caranya masing-masing. Penulis memilih dua media *online* untuk dijadikan objek penelitian. Media online yang akan dijadikan sebagai objek penelitian antara lain portal berita Kompas.com dan konten berita youtube tvOneNews.

Alasan penulis memilih kedua media tersebut karena beberapa indikator. Pertama, Kompas.com dipilih karena reputasinya sebagai media independen dan jangkauan pembaca yang luas. Kompas.com adalah anak perusahaan dari PT. Kompas Cyber Media dan dimiliki oleh Kompas Gramedia Group. Meskipun termasuk salah satu konglomerasi media, Kompas.com tidak terafiliasi politik dengan pihak manapun (Maulana & Prasetijowati, 2022). Hal ini menjadikan Kompas.com relevan untuk dianalisis dalam konteks representatif media independen.

Kedua, channel youtube tvOneNews dipilih karena afiliasi politik pemiliknya dengan pemerintahan yang berkuasa. TvOne merupakan salah satu anak perusahaan Viva Group (Nugroho, 2023). Viva Group merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie (Ical). Ical adalah salah satu petinggi dari Partai Golkar, partai yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini menjadi menarik karena penelitian akan melihat sejauh mana dampak afiliasi politik konglomerasi media dalam pemberitaan. Konglomerasi media dianggap menjadi ancaman bagi kebebasan pers (Noerdin et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada analisis *framing* di berbagai platform media online, yakni portal berita Kompas.com dan konten berita youtube tvOneNews. Peneliti akan melihat cara media Kompas.com dan tvOneNews dalam memilih *framing* dalam menyajikan informasi tentang dinamika RUU Pilkada 2024. Studi ini perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan serta memperkaya studi-studi terkait analisis *framing* pemberitaan media massa, khususnya pemberitaan di berbagai platform media *online*. Sejauh ini, studi terkait hal tersebut didominasi oleh studi komparasi *framing* pemberitaan politik antar media yang berbeda. Akan tetapi, studi yang membahas mengenai *framing* pemberitaan polemik RUU Pilkada dan konstruksi realitasnya belum banyak dilakukan. Di sinilah sumbangsih penelitian yang akan dilakukan penulis dalam kajian politik media, khususnya wacana analisis *framing* dan konstruksi realitas.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa media-media *online* menunjukkan keberpihakan pada mayoritas masyarakat Indonesia dengan menciptakan *framing* yang sejalan. Asumsi sementara ini didapatkan berdasarkan hasil observasi awal bahwa berita-berita terkait polemik RUU Pilkada 2024 yang dibuat Kompas.com yang menekankan pada narasi-narasi pertentangan dan tvOneNews yang netral. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengekplorasi bagaimana kedua media tersebut memberikan framing isu RUU Pilkada. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana framing tersebut menunjukkan keberpihakan media dalam isu tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada 2 rumusan masalah, yakni dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana media Kompas.com dan tvOneNews mem-*framing* berita terkait polemik RUU Pilkada?
2. Bagaimana konstruksi realitas terkait polemik RUU Pilkada 2024 yang dilakukan Kompas.com dan tvOneNews?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini akan bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui *framing* berita yang diciptakan media Kompas.com dan tvOneNews terkait dinamika RUU Pilkada.
2. Mengetahui pengaruh kekuasaan elit dalam pembentukan framing yang disebarluaskan ke publik.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian dapat menambah nilai tambah pengetahuan terkait bagaimana media membentuk *framing* pemberitaan politik. Selain itu, penelitian ini memberikan pengembangan kajian politik media melalui konstruksi realitas yang media bentuk.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, mempunyai pengetahuan dan wawasan terkait analisis *framing* pemberitaan politik media *online* serta konstruksi realitas yang dibentuk media.
- b. Bagi pembaca, pemanfaatan berupa bahan kajian politik media terkait analisis *framing* pemberitaan media *online* serta konstruksi realitas yang media bentuk.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai *framing*, portal berita online dan konten youtube telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Penulis mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian penulis. Berdasarkan *literature review* yang sudah dilakukan, peneliti mengelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam beberapa tema.

1. Portal Berita Online

Penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas tentang portal berita online. Penulis mengelompokan beberapa jurnal yang menjadi acuan

dalam beberapa pola kecenderungan. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan analisis *framing* Robert Entman sebagai teori penelitiannya. Peneliti sebelumnya cenderung melakukan pengamatan terhadap dua atau tiga media berkaitan suatu tema tertentu. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori analisis *framing* Robert Entman. Aspek-aspek yang diteliti berkaitan *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (identifikasi penyebab), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian). Hasil penelitian umumnya menunjukkan perbandingan berkaitan framing media satu dengan lainnya. Selain itu, perbandingan yang dilakukan hanya sebatas bagaimana media membingkai suatu isu. Hasil penelitian juga cenderung sama dalam semua aspek yang diteliti. Akan tetapi, ada juga yang terdapat perbedaan dalam salah satu aspek. Perbedaan tersebut terletak pada aspek *treatment recommendation* karena pada aspek ini menunjukkan keberpihakan media terhadap suatu masalah. Sikap media baik menentang atau mendukung terlihat melalui aspek *treatment recommendation* seperti penelitian yang dilakukan oleh (Saeni, 2024); (Ariansyah, 2023); (Aziz & Wahid, 2021); (Ayomi, 2021); dan (Ahmad et al., 2021).

Selain itu, penelitian sebelumnya juga terdapat penelitian-penelitian yang hanya menggunakan satu media saja sebagai obyek yang dianalisis. Media tersebut dianalisis menggunakan teori yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yakni analisis *framing* Robert Entman. Peneliti hanya berfokus pada data-data satu media berkaitan dengan suatu topik tertentu. Hasil penelitian cenderung spesifik menyebutkan bahwa *framing* berita yang diciptakan bermuatan positif atau negatif dan menentang atau menerima. Kecenderungan seperti ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Farida & Yoedtadi, 2019); (Pradana et al., 2023); dan (Siregar & Qurniawati, 2022).

Penelitian lainnya ditemukan kecenderungan lain, dimana terdapat peneliti yang cenderung menggunakan teori lain. Dalam penelitian analisis *framing* sebelumnya, terdapat peneliti yang menggunakan teori analisis *framing* dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam penelitian tersebut, peneliti fokus dalam aspek pembingkaian berita yang meliputi aspek-aspek seperti sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Hasil penelitiannya cenderung menjelaskan mengenai sikap yang ditujukan media tersebut. Penelitian menggunakan metode analisis ini pernah dilakukan oleh peneliti seperti (Agustiani et al., 2020); (Aliffah, 2018); (Siagian & Ritonga, 2024); (Wibisono, 2024); dan (Hasan & Fathan, 2020).

2. Situs Youtube

Penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas tentang situs youtube. Penulis mengelompokan beberapa jurnal yang menjadi acuan dalam beberapa pola kecenderungan. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan analisis *framing* Robert Entman sebagai teori penelitiannya. Peneliti sebelumnya cenderung melakukan pengamatan terhadap satu media berkaitan konten tema tertentu. Hasil penelitiannya menjelaskan aspek-aspek define problems, diagnose causes, make a moral judgement, dan treatment reccomendation dalam konten tersebut. Penelitian-penelitian yang berfokus pada hal tersebut pernah dilakukan oleh peneliti seperti (Barokah et al., 2023); (Anjabi & Anwari, 2024); dan (Adi, 2024).

Penelitian lainnya ditemukan kecenderungan lain, dimana terdapat peneliti yang cenderung melakukan perbandingan framing media-media. Peneliti sebelumnya melakukan pengamatan terhadap dua atau tiga media berkaitan suatu tema tertentu. Data penelitian media satu dengan yang lainnya dianalisis masing-masing. Hasil penelitiannya menunjukkan perbandingan antara framing media yang satu dengan media lainnya. Kecenderungan seperti ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aji & Sardjono, 2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya memang banyak yang sudah membahas tentang framing pemberitaan politik dan menggunakan teori yang sama. Akan tetapi, penelitian sebelumnya belum banyak yang membahas *framing* pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024 sertakanstruksi realitas yang dibentuk media melalui framing. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya sebatas studi komparasi antar dua media. Akan tetapi, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana konstruksi realitas yang media lakukan melelui pembentukan framing yang disebarluaskan ke publik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian non-lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi yang menekankan pencarian konsep, pengertian, makna, simbol, karakteristik, gejala maupun deskripsi suatu fenomena (Yusuf, 2014). Tujuannya adalah mencari dan menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan atau fenomena melalui perangkat prosedur ilmiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara sistematis. Metode penelitian kualitatif menganalisis secara deskriptif data-data yang telah diperoleh.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis *framing*. Analisis framing adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji cara media membungkai atau memaknai suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif, analisis framing tidak dilihat secara kuantitatif atau statistik. Akan tetapi, analisis framing dipahami secara mendalam dengan mencermati mulai dari bahasa, narasi hingga gambar yang digunakan media (Entman, 2013). Entman (2013) menyatakan bahwa framing melibatkan dua proses utama, yaitu seleksi isu dan penonjolan elemen-elemen tertentu. Oleh karena itu, analisis framing tepat untuk melihat media memilih realitas dan menonjolkan makna tertentu untuk membentuk persepsi publik.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari artikel berita dan konten youtube dua media online, yakni Kompas.com dan tvOneNews. Artikel berita dan konten youtube yang dipilih adalah kedua hal tersebut yang diterbitkan dari tanggal 20 Agustus-19 September 2024. Alasan pemilihan artikel dan konten berita tersebut dikarenakan pada tanggal 20 Agustus 2024 polemik RUU Pilkada mulai menjadi perhatian masyarakat dan mengalami puncak pada 22 Agustus 2024. Pada tanggal tersebut terjadi protes besar-besaran terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Data dalam penelitian ini didapatkan dari portal berita Kompas.com dan situs youtube tvOneNews. Penelitian ini akan menganalisis beberapa artikel berita yang diterbitkan dari Kompas.com dan konten berita tvOneNews. Artikel berita dan konten berita dalam penelitian ini berjumlah tiga puluh enam unit analisis dengan rincian sebagai berikut.

a. Artikel Berita Kompas.com

- 1) Judul Artikel: Dapat Informasi RUU Pilkada Besok, Bahas Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah
- 2) Judul Artikel: Fraksi PDIP Sebut Pembahasan RUU Pilkada 2024 Bertentangan dengan Putusan MK
- 3) Judul Artikel: MK Tak Boleh Komentari soal Pembahasan RUU Pilkada di DPR
- 4) Judul Artikel: DPR Kebut Bahas RUU Pilkada untuk lawan Putusan MK, Bivitri: “Kegilaan” yang Perlu ...
- 5) Judul Artikel: RUU Pilkada yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok dalam Rapat Paripurna
- 6) Judul Artikel: DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDI-P yang Menolak
- 7) Judul Artikel: Jokowi Bahas Tambang di Istana saat Rakyat Demo Kawal Putusan MK

- 8) Judul Artikel: Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ketua BEM UI: Hanya untuk Meredam
- 9) Judul Artikel: Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ray Rangkuti: Itu Taktik agar Adem
- 10) Judul Artikel: Mahasiswa yang Demo di DPR Saling Mengingatkan “Hati-Hati Provokasi”
- 11) Judul Artikel: Kecurigaan Publik Kian Memuncak Usai DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada
- 12) Judul Artikel: Dasco Bantah DPR Batal Sahkan RUU Pilkada karena Eskalasi Demo
- 13) Judul Artikel: Perlawanan Sehari Kawal Putusan MK, RUU Pilkada Batal Disahkan
- 14) Judul Artikel: Perlawanan Rakyat Sukses Buat RUU Pilkada Batal Disahkan, Mahfud: Rakyat Tak Bodoh
- 15) Judul Artikel: Keraguan Publik atas Janji KPU Patuhi Putusan MK
- 16) Judul Artikel: Publik Diminta Jangan Mau Dininabobokan DPR-KPU, Tetap Kawal Putusan MK!
- 17) Judul Artikel: Ombudsman Temukan Pelanggaran Pengamanan Aksi Demonstrasi Penolakan RUU Pilkada
- 18) Judul Artikel: Isu RUU Perampasan Aset Dianggap Serangan Balik Jokowi Usai DPR Gagal Loloskan RUU Pilkada

b. Konten Berita tvOneNews

- 1) Judul Konten: Putusan MK Game Changer Pilkada
- 2) Judul Konten: DPR Bahas RUU Pilkada, PDIP: Bertentangan dengan Putusan MK
- 3) Judul Konten: Putusan MA dan MK Jadi Perdebatan di Baleg DPR soal RUU Pilkada
- 4) Judul Konten:
- 5) Judul Konten: Perubahan UU Pilkada “Potong” Putusan MK?

- 6) Judul Konten: Revisi Undang-undang Pilkada Beda dengan Putusan MK?
- 7) Judul Konten: Teriakan “Lawan” Menggema di Depan Gedung DPR
- 8) Judul Konten: Ikut Aksi Demo di DPR, Reza Rahardian Naik ke Mobil ke Orasi
- 9) Judul Konten: Mahasiswa di Makasar Demo Tolak RUU Pilkada
- 10) Judul Konten: Datangi Massa Pendemo di DPR, Habiburokhman Terkena Lemparan
- 11) Judul Konten: Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Tetap Pakai Putusan MK
- 12) Judul Konten: KPU akan Tindak Lanjuti Putusan MK Lewat Konsultasi DPR RI
- 13) Judul Konten: Ini Alasan DPR Batalkan Revisi UU Pilkada
- 14) Judul Konten: Puan Respons Dinamika Politik Soal Revisi UU Pilkada
- 15) Judul Konten: KPU Siapkan PKPU usai DPR Batalkan RUU Pilkada
- 16) Judul Konten: Sufmi Dasco Datangi Polda Metro Jaya untuk Meminta Polisi Bebaskan Pendemo yang Ditahan
- 17) Judul Konten: Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada 2024
- 18) Judul Konten: Presiden Jokowi Buka Suara Tanggapi Aksi Demonstrasi RUU Pilkada 2024

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni teknik observasi tekstual (non-participant observer) dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Observasi tekstual (non-participant observer) adalah kondisi di mana pengamat tidak berada di tempat kegiatan atau dapat dikatakan tidak melakukan apa yang sedang diamati (Yusuf, 2014).

Selanjutnya, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Yusuf (2014) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan tentang sesuatu yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan artefak. Dokumen ini menjadi sumber informasi yang berguna terhadap penelitian kualitatif.

Penelitian ini mengamati artikel-artikel berita yang diterbitkan oleh media Kompas.com dan konten-konten berita youtube tvOneNews terkait polemik RUU Pilkada 2024. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan kata kunci RUU Pilkada, demonstrasi, dan kawal putusan MK. Data-data yang terkumpul kemudian penulis pilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Penulis menganggap teknik ini adalah teknik yang paling relevan karena memungkinkan penulis menyeleksi artikel dan konten berita yang paling representatif menggambarkan polemik RUU Pilkada. Artikel dan konten berita yang dipilih adalah artikel dan konten yang dipublikasikan pada awal kemunculan, puncak ketegangan, dan pasca ketegangan polemik RUU Pilkada 2024. Kriteria yang digunakan untuk artikel Kompas.com adalah kategori News Nasional, sedangkan tvOneNews adalah berita yang dipublikasikan melalui program news bukan talkshow dan acara diskusi lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses setelah data selesai dikumpulkan. Data penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis *framing* menurut Robert Entman. Analisis *framing* Robert Entman akan berfokus pada seleksi isu dan penonjolan pada empat elemen. Entman menjelaskan bahwa analisis framing akan berkaitan dengan empat elemen kunci seperti *define problems* (definisi masalah), *diagnose cause* (diagnosa sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *suggest remedies* (menyarankan penyelesaian) (Entman, 1993).

Analisis Framing sering digunakan sebagai alat untuk membedah teks berita, khususnya analisis framing model Robert Entman. Struktur analisis *framing* menurut Robert Entman dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Elemen Framing Model Entman

<i>Define Problems</i>	Bagaimana media memaknai sebuah masalah.
<i>Diagnose Cause</i>	Bagaimana masalah itu bisa terjadi dan apa yang dianggap sebagai sumber penyebab masalah tersebut.
<i>Make Moral Judgement</i>	Bagaimana evaluasi atau nilai moral yang disajikan dalam menyikapi fenomena atau masalah tersebut.
<i>Suggest Remedies</i>	Bagaimana penyelesaian yang ditawarkan dan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam menganalisis data penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah. Pertama, peneliti menyeleksi dan memetakan artikel dan konten berita berkaitan polemik RUU Pilkada 2024. Artikel dan konten berita berkaitan dengan pemberitaan polemik RUU Pilkada dikumpulkan dari media Kompas.com dan tvOneNews berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Artikel dan konten berita yang terkumpul kemudian dipetakan berdasarkan periode awal kemunculan, puncak ketegangan, dan pasca ketegangan.

Kedua, peneliti melakukan analisis empat elemen framing menurut Entman untuk membedah setiap artikel dan konten berita yang sudah dipetakan. Setiap artikel dan konten berita dari kedua media dianalisis dari elemen framing satu dengan elemen lainnya. Analisis elemen-elemen framing

dari artikel dan konten berita disajikan dalam bentuk tabel supaya mudah dipahami.

Ketiga, peneliti melakukan interpretasi data terhadap artikel dan konten berita kedua media. Artikel dan konten berita yang telah dianalisis menggunakan analisis framing Robert Entman kemudian diinterpretasikan. Interpretasi data ini bertujuan untuk memberi kesimpulan terhadap framing yang diciptakan serta realitas yang tercipta dari konteks artikel dan konten berita tersebut. Konteks didapatkan ketika temuan penelitian dan *literature* yang digunakan telah dinterpretasi (Ariansyah, 2023).

5. Validitas Data

Uji validitas data merupakan tahapan uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji validitas data dapat berupa validitas internal (uji kredibilitas data), validitas eksternal (uji transferabilitas), reliabilitas (uji dependabilitas data), dan obyektifitas (uji komfirmabilitas). Namun, validitas internal (uji kredibilitas) dianggap sebagai yang paling utama (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, validitas data yang digunakan adalah validitas internal dengan teknik peningkatan ketekunan. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan membaca hasil penelitian, referensi buku, dan dokumen-dokumen penelitian dapat membuat wawasan peneliti semakin luas dan tajam. Wawasan peneliti yang luas dan tajam menjadi bekal dalam memeriksa data yang ditemukan itu dapat dipercaya atau tidak.

Validitas data berikutnya adalah validitas menggunakan teknik *peer debriefing*. *Peer debriefing* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melibatkan teman sejawat atau ahli yang tidak melakukan penelitian. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi dengan tujuan mendapatkan kritik yang konstruktif (Haryoko et al., 2020). Selain itu, teknik ini dilakukan untuk menghindari bias interpretasi peneliti. Dalam konteks penelitian ini, *peer debriefing* akan dilakukan dengan dosen pembimbing.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam Bab:

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika dalam penulisan skripsi.

Bab II. TEORI ANALISIS *FRAMING* ROBERT ENTMAN

Bab ini berisi definisi konseptual dan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dibahas tentang definisi konseptual media online, *framing*, media dan politik serta ideologi media. Teori pada bab kedua membahas tentang teori analisis *framing* menurut Robert N. Entman.

Bab III. GAMBARAN UMUM MEDIA KOMPAS.COM DAN TVONENEWS

Bab ini berisi profil dua media online yang dijadikan sebagai objek penelitian. Kedua media online tersebut adalah Kompas.com dan tvOneNews.

Bab IV. *FRAMING* YANG DICIPTAKAN OLEH MEDIA KOMPAS.COM DAN TVONENEWS TERKAIT BERITA DINAMIKA RUU PILKADA

Bab ini berisi data-data yang telah terkumpul selama proses penelitian melalui observasi tekstual dan dokumentasi. Bab ini akan dijadikan acuan dasar dalam bab V. Bab ini akan membahas bagaimana media memberikan framing pada pemberitaan terkait polemik RUU Pilkada 2024.

Bab V. KONSTRUKSI REALITAS POLEMIK RUU PILKADA OLEH KOMPAS.COM DAN TVONENEWS

Bab ini akan mengkaji bagaimana konstruksi realitas yang kedua media Kompas.com dan tvOneNews yang ciptakan melalui framing berita. Bab ini akan mengacu pada temuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab IV. Temuan pada bab IV akan diinterpretasi menggunakan teori analisis framing milik entman kembali.

Bab VI. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti dimulai ketika mengumpulkan data secara valid yang diperoleh dari sumber data hingga dianalisis menjadi satu kesimpulan mengenai analisis framing dan konstruksi realitas dalam pemberitaan polemik RUU Pilkada yang dilakukan oleh Kompas.com dan tvOneNews.

BAB II

TEORI ANALISIS *FRAMING* ROBERT ENTMAN

A. Definisi Konseptual

1. Media *Online*

Pamuji (2019) menjelaskan bahwa media *online* merupakan suatu format media yang hanya tersedia dan diakses melalui internet. Media *online* dapat dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara *online*. Media *online* juga sering disebut sebagai istilah untuk media yang berbasis pada multimedia dan telekomunikasi. Media *online* dapat berupa portal berita *online*, *website*, *TV-online*, *radio-online*, dan lainnya dengan karakteristik masing-masing.

Penelitian ini akan membahas menganalisis salah satu produk media *online*, yaitu berita *online*. Berita *online* adalah artikel berita yang diterbitkan melalui laman internet. Berita *online* menjadi salah satu dampak dari hadirnya jurnalisme *online*. Jurnalisme *online* lahir karena adanya media *online*. Jurnalisme *online* menjadi generasi baru setelah era jurnalisme konvensional dan jurnalisme penyiaran (Pamuji, 2019).

2. *Framing*

Framing adalah cara untuk membentuk sebuah realitas dan menyederhanakannya dengan tujuan ditampilkan kepada publik atau pembaca (Gitlin, dalam Eriyanto 2011). Gitlin dalam Eriyanto (2011) menjelaskan bahwa *frame* atau bingkai merupakan alat bagi wartawan untuk mengemas peristiwa yang kompleks menjadi mudah dipahami dengan cara pandang tertentu. Eriyanto (2011) berpendapat bahwa *framing* adalah cara atau alat yang digunakan untuk melihat bagaimana perspektif wartawan dalam memilih suatu isu untuk dijadikan berita. Perspektif tersebut nantinya akan menentukan realitas apa yang diambil, adakah bagian yang dihilangkan

atau ditonjolkan, dan tujuan penulisan berita tersebut untuk apa (Eriyanto, 2011).

Entman (2013) mengartikan *framing* sebagai sebuah proses memilih dan menyoroti aspek-aspek tertentu dalam sebuah isu atau peristiwa untuk dihubungkan dengan tujuan mendapatkan evaluasi atau interpretasi tertentu. *Framing* memiliki dua fungsi yang sangat penting. Pertama, *problem definition* (pendefinisian masalah yang seringkali sudah ditentukan sejak awal. Kedua, *remedy* (rekomendasi karena seringkali menjadi bentuk pernyataan sikap mendukung atau menolak kebijakan publik (Entman, 2013). Penelitian ini akan menggunakan konsep *framing* Robert Entman sebagai rujukan.

3. Media dan Politik

Media dan Politik adalah bentuk hubungan antara institusi media dan kekuatan politik yang saling mempengaruhi dalam mengatur wacana, menyalurkan informasi politik, dan membentuk opini publik. Secara konseptual, media dan politik adalah sebuah proses dan praktik di mana media digunakan sebagai alat komunikasi, kontrol, dan mobilisasi politik oleh aktor politik negara maupun non-negara. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran netral dalam menyampaikan informasi politik. Akan tetapi, media juga memiliki kekuatan untuk membentuk representasi realitas politik melalui proses seleksi, penonjolan, dan pembingkaian terhadap isu tertentu (Entman, 1993).

Media dan politik dapat dipahami sebagai bagian dari sistem demokrasi yang idealnya menjamin keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Akan tetapi, hubungan antara media dan politik bersifat dialektis. Media dapat berperan sebagai saluran informasi politik, ruang deliberasi publik atau pengawas. Namun, media juga dapat menjadi alat hegemoni yang menyuarakan kepentingan elit politik dan ekonomi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur kepemilikan dan orientasi ideologisnya

(Curran & Seaton, 2010). Media tidaklah netral, media dapat memperkuat atau menantang struktur kekuasaan yang dominan melalui pembingkaian, penyusunan agenda, dan penonjolan isu-isu politik tertentu.

4. Ideologi Media

Ideologi media mengacu pada sistem nilai, kepercayaan, dan asumsi yang secara implisit maupun eksplisit tertanam dalam praktik dan produk media. Hal tersebut berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial dan politik. Ideologi ini termanifestasikan dalam cara media menyeleksi, mengorganisasi, dan menarasikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Thompson (1990) menjelaskan ideologi dalam konteks media dapat dipahami sebagai makna-makna yang berkaitan dengan kekuasaan. Media menjadi sarana untuk mempertahankan atau menantang struktur dominasi melalui penyebaran representasi simbolik.

Media menyisipkan ideologi ke dalam pesan yang kemudian dimaknai oleh khalayak dalam kerangka sosial tertentu. Ideologi media seringkali dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, afiliasi politik, dan relasi ekonomi antara media dan kekuasaan. Oleh karena itu, media dapat berperan sebagai alat hegemoni yang mereproduksi status quo. Selain itu, media juga dapat menjadi ruang kontestasi ideologi yang membuka peluang perlawanan terhadap narasi dominan (Thompson, 1990).

Dalam konteks Indonesia, ideologi media sering kali terlihat dari keberpihakan media terhadap kekuasaan. Misal, media yang dimiliki oleh konglomerat yang memiliki afiliasi politik tertentu cenderung menampilkan narasi yang lebih ramah terhadap pemerintah atau elit politik yang sejalan dengan pemilik media. Fenomena ini menegaskan bahwa ideologi media tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan modal. Selain itu, hal tersebut juga mengindikasikan ideologi media tidak dapat dipisahkan dari struktur

ekonomi-politik dan relasi kekuasaan yang melingkupi ekosistem media di Indonesia.

B. Teori Penelitian

1. Teori Analisis *Framing* Robert M. Entman

Analisis *framing* sebagai metode analisis banyak terpengaruh berbagai pemikiran psikologi maupun sosiologi. Erving Goffman dan Peter L Berger menjadi sosiolog yang menyumbang pemikirannya. Untuk psikologi sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan kognisi dan skema. Erving Goffman adalah tokoh yang pertama kali mengenalkan analisis *framing* sebagai metode. Teori analisis *framing* berkembang menjadi beberapa model. Model-model dalam analisis *framing* terdiri dari model Murray Edelman, model William A. Gamson, model Robert N. Entman serta model Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2011). Penelitian ini akan menggunakan analisis *framing* menurut Robert Entman sebagai teori dalam penelitian.

Analisis *framing* menurut Entman akan berkaitan dengan kata kunci, metafora, gambar, konsep, dan simbol yang ditekankan pada narasi berita. *Framing* melibatkan proses pemilihan dan penyorotan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk penafsiran sebuah peristiwa yang spesifik. Peristiwa yang sama bisa saja dibingkai dengan berbeda melalui penekanan selektif, pilihan kata, dan citra. *Frame* menurut Entman memiliki empat elemen kunci *defining problematic* (pendefinisian masalah), *identifying cause* (identifikasi sebab), *conveying a moral judgement* (membuat penilaian moral), dan *endorsing remedies* (menyarankan solusi). Empat elemen tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk membedah bagaimana framing dibentuk (Entman, 2013).

Entman (1993) menjelaskan mengenai empat elemen framing dengan istilah sedikit berbeda dalam artikelnya. Meskipun terdapat perbedaan istilah dalam penyebutan elemen-elemen, baik artikel maupun buku memiliki

konteks yang sama. Penelitian ini akan menggunakan rujukan utama berupa artikel Entman. Dalam sebuah artikelnya, Entman menyebutkan ada empat elemen framing seperti *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, dan *suggest remedies* (Entman, 1993).

Entman menjelaskan bahwa elemen pertama adalah *define problem*. *Define problem* adalah menentukan apa yang dilakukan oleh agen kasual (Entman, 1993). *Define problem* atau pendefinisian masalah merupakan cara melihat bagaimana media menyeleksi, menyoroti aspek, dan menyajikan suatu isu sebagai masalah. Define problem sangat penting karena dapat mempengaruhi opini publik mengenai pentingnya isu dan bagaimana mereka harus menyikapinya. Media sering kali menyesuaikan definisi masalah dengan target audiens atau afiliasi politik dalam pembentukan framing pemberitaanya.

Elemen kedua yang disebutkan Entman adalah *diagnose cause*. *Diagnose cause* adalah mengidentifikasi kekuatan yang menjadi sumber masalah (Entman, 1993). Diagnose cause atau mengidentifikasi penyebab merupakan cara bagaimana media menjelaskan sumber masalah yang telah mereka ketahui. Hal tersebut dapat berupa penjelasan secara eksplisit maupun implisit tentang apa atau siapa yang menjadi sumber masalah suatu fenomena. Proses diagnose cause juga dapat mencerminkan kecenderungan ideologis media. Misal, pemberitaan tentang krisis ekonomi antara media satu dan lainnya berlawanan dalam menyebutkan sumber masalah.

Entman menyebutkan make moral judgement sebagai elemen ketiga. *Make moral judgement* evaluasi agen kasual dan efeknya (Entman, 1993). *Make moral judgement* atau penilaian moral merujuk pada bagaimana media membuat penilaian berkaitan aktor, peristiwa atau kebijakan yang diberitakan. Hal tersebut dapat diketahui dari penggunaan metafora, kutipan pihak tertentu, bahasa evaluatif, dan pilihan gambar. Dalam konteks berita politik, pembingkaian nilai moral umumnya digunakan untuk mendukung atau menentang tindakan pemerintah.

Elemen framing terakhir yang disebutkan Entman adalah *suggest remedies*. *Suggest remedies* adalah penawaran penyelesaian masalah dan kemungkinan dampaknya (Entman, 1993). *Suggest remedies* atau solusi yang disarankan merupakan cara bagaimana media menyarankan penyelesaian atas masalah yang didefinisikan. Pembingkaian solusi sering kali merupakan kelanjutan logis dari dua elemen sebelumnya: penyebab dan penilaian moral. Dalam beberapa kasus, solusi yang ditawarkan bersifat implisit. Misal, media menekankan keberhasilan sebuah model kebijakan di negara lain. Hal tersebut membuat media secara tidak langsung menyarankan penerapannya di negaranya sendiri. Metode ini membungkai solusi tanpa secara eksplisit menyerukan tindakan.

Dalam mengaplikasikan teori ini pada kajian konten media, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten dengan metode analisis framing. Unit analisis yang digunakan adalah berita online dari media online Kompas.com dan tvOneNews. Berita tersebut telah dipilih berdasarkan isu yang relevan dan dalam kurun waktu tertentu. Setiap teks dan konten berita dianalisis dengan menelusuri dan mengidentifikasi setiap elemen framing menurut Entman. Tahapan-tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

a. *Define Problem*

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan masalah inti dari isu yang diberitakan. Peneliti melihat diksi yang digunakan pada judul, narasi yang dominan dalam teks, dan cara media menyusun informasi yang mengarahkan pembaca untuk melihat suatu isu sebagai masalah tertentu.

b. *Diagnose Cause*

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi apa atau siapa yang dianggap oleh media sebagai penyebab masalah. Dalam teks dan konten berita, penyebab ini dapat disampaikan secara tidak langsung dan langsung melalui kutipan sumber, struktur kalimat pembingkaian, atau

penyusunan informasi. Peneliti menelusuri situasi atau pihak yang dianggap memiliki tanggungjawab atas masalah tersebut.

c. *Make Moral Judgement*

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi nilai moral yang disampaikan oleh media. Media tidak hanya sekadar menyampaikan informasi. Akan tetapi, media juga secara implisit atau eksplisit memberikan penilaian moral. Peneliti akan menelusuri cara media menyisipkan opini dan penilaian tertentu terhadap aktor, tindakan, atau kebijakan yang diberitakan. Penilaian moral seringkali dapat dilihat dari pemilihan narasumber dan pemilihan gaya bahasa.

d. *Suggest Remedies*

Pada tahapan ini, peneliti akan mengidentifikasi saran solusi yang ditawarkan oleh media. Saran solusi seringkali dibingkai dalam narasi media atau kutipan narasumber dalam teks dan konten berita. Peneliti akan menelusuri media dalam membentuk opini publik, mendukung atau menolak kebijakan, dan menyarankan tindakan tertentu sebagai bentuk penyelesaian masalah.

Dalam melakukan analisis *framing*, setiap berita yang telah dipilih akan dibedah secara sistematis berdasarkan empat elemen tersebut. Peneliti membuat lembar khusus dan membuat tabel untuk memudahkan pemetaan elemen *framing* dalam setiap berita. Peneliti melakukan olah data dan interpretasi pada temuan-temuan analisis *framing*. Proses interpretasi data dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik ketika berita tersebut ditulis. Oleh karena itu, pendekatan metodologis ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya isi berita. Akan tetapi, membantu peneliti juga dalam memahami konstruksi makna dan kepentingan di balik teks media.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOMPAS.COM DAN TVONENEWS

A. Media Kompas.com

1. Sejarah Kompas.com

Kompas.com merupakan salah satu media online berbasis portal berita. Media online Kompas.com menjadi bagian dari konglomerasi media Kompas Gramedia Group. Kompas adalah media yang didirikan oleh Jakob Oetama dan Petrus Kanisius Ojong. Kompas mulai mempublikasikan berita di Indonesia pada tahun 1963 (Gramedia, n.d.). Perkembangan teknologi dan digitalisasi media membuat Kompas berinovasi dengan merilis beberapa platform media. Salah satu platform media Kompas adalah portal berita Kompas.com.

Kompas.com menjadi salah satu pelopor media online di Indonesia. Kompas.com muncul di internet pertama kali pada tahun 1995. Masa awal kemunculannya, Kompas.com hadir dengan domain kompas.co.id dan dikenal dengan nama Kompas Online. Kompas Online berisi konten-konten dari replika harian Kompas. Kompas Online didirikan dengan tujuan menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau dalam pendistribusian Koran. Selain itu, Kompas Online juga memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada pembaca harian Kompas. Keberadaan Kompas Online sangat memudahkan pembaca harian Kompas. Hal tersebut dikarenakan pembaca harian Kompas tidak perlu menunggu berhari-hari lagi.

Pada tahun 1996, domain Kompas Online berubah menjadi kompas.com. Berubahnya alamat domain ini memberikan manfaat tersendiri bagi Kompas Online. Kompas Online menjadi semakin populer. Jangkauan Kompas Online tidak hanya di Indonesia, tetapi dapat menjangkau mancanegara juga. Potensi bisnis digital yang besar membuat Kompas Online mengalami perubahan pada tahun 1998. Kompas Online lahir kembali sebagai unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT. Kompas Cyber

Media (KCM). Pada era ini, Kompas Online dikenal dengan nama KCM yang menyajikan berita-berita terkini sepanjang hari.

Pengunjung KCM mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Hal tersebut membuat KCM terus berbenah dan berinovasi dalam menghadapi digitalisasi media. Usaha tersebut diwujudkan pada tahun 2008. KCM me-rebranding menjadi Kompas.com pada tahun 2008. Rebranding dilakukan dengan tujuan mengembalikan brand Kompas yang dikenal dengan sajian jurnalisme yang bermakna. Kompas.com hadir sebagai portal berita di tengah situasi banyaknya informasi jurnalistik yang tidak jelas. Selain itu, Kompas.com ingin menjadi contoh yang baik dalam jurnalisme (Kompas.com, n.d.).

2. Struktur Kepengurusan Kompas.com

- a. Editor in Chief: Amir Sodikin
- b. Redaktur Senior: Wisnu Nugroho
- c. Managing Editor: Laksono Hari Wiwoho dan Johanes Heru Margianto.
- d. Assistant Managing Editor: Ana Shofiana Syatiri, Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Ingried Dwi Wedhaswary, dan Ni Luh Made Pertiwi F.
- e. Administrative & Secretary: Ira Fauziah, Suci Primadona, Nafisa Maulida Putri, dan Fadiah Adlina Putri Ghaisani.
- f. Editor: Diamanty Meiliana, Sabrina Asril, Novianti Setuningsih, Ich Rastika, Dani Prabowo, Bagus Santosa, Fitria Chusna Farisa, Aryo Putranto Saptohutomo, Jessi Carina, Irfan Maullana, Nursita Sari, Kristian Erdianto, Ivany Atina Arbi, Ambaranie Nadia Kemala Movana, Ihsanuddin, Rakhmat Nur Hakim, Larissa Huda, David Oliver Purba, Robertus Belarminus, Pythag Kurniati, Khairina, Ardi Priyatno Utomo, Dita Angga Rusiana, Dheri Agriesta, Krisiandi, Andi Hartik, Gloria Setyvani Putri Kumala, Teuku Muhammad Valdy Arief, Reni Susanti, Farid Assifa, Rachmawati, Michael Hangga Wismabratia,

Muhamad Syahrial, Maya Citra Rosa, Irawan Sapto Adhi, Aditya Jaya Iswara, Danur Lambang Pristiandaru, Erlangga Djumena, Yoga Sukmana, Akhdi Martin Pratama, Aprillia Ika, Muhammad Idris, Mela Arnani, Hilda Hastuti, Dian Maharani, Kistyarini, Andi Muttya Keteng, Tri Susanto Setyawan, Andika Aditia, Rintan Puspita Sari, Aris Fertonny Harvenda, Agung Kurniawan, Azwar Ferdian, Aditya Maulana, Stanly Ravel Pattiwaelapia, Agustinus Wisnubrata, Glori Kyrious Wadrianto, Muhammad Reza Wahyudi, Reska Koko Nistanto, Gito Yudha Pratomo, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Nabilla Tashandra, Anggara Wikan Prasetya, Ni Nyoman Wira Widyanti, Silvita Agmasari, Yu Harrani Aisyah, Eris Eka Jaya, Aloysius Gonsaga Angei Ebo, Firzie Adrian Idris, Ferril Dennys Sitorus, Sem Singungging Bagaskara, Mochamad Sadheli, Faishal Raihan, Ervan Yudhi Tri Atmoko, Shierine Wangsa Wibawa, Bestari Kumala Dewi, Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, Resa Eka Ayu Sartika, Mahardini Nur Afifah, Ariska Puspita Anggraini, Shintaloka Pradita Sicca, Elizabeth Ayudya Ratna Rininta, Ria Apriani Kusumastuti, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Esra Dopita Maret, Abdul Haris Maulana, Ayunda Pininta Kasih, Dian Ihsan Siregar, Albertus Aditya K., Gischa Prameswari Serafica, Tri Indriawati, Lukman Hadi, Subroto, Josephus Primus, Sari Hardiyanto, Rizal Setyo Nugroho. Rendika Ferri Kurniawan, Bambang P. Jatmiko, Wahyu Adityo Prodjo, Sandro Gatra, Egidius Patnistik, Bayu Galih Wibisono, Yunanto Wiji Utomo, Palupi Annisa Auliani, Fabian Yanuarius, dan Erwin Kusuma Oloan Hutapea.

- g. Reporter: Nicholas Ryan Aditya, Ardito Ramadhan Dhanesworo, Dian Erika Nugraheny, Achmad Nasrudin Yahya, Irfan Kamil, Robertus Tatang Guritno Donny Kuma, Rahel Narda Chaterine, Vitorio Mantalean, Adhyasta Dirgantara, Fika Nurul Ulya, Singgih Wiryono, Syakirun Ni'am, Muhamad Isa Bustomi, Tria Sutrisna, Nirmala Maulana Achmad, Muhammad Naufal, Mita Amalia Hapsari, Annisa Ramadani

Siregar, M. Chaerul Halim, Joy Andre T, Reza Agustian, Sania Mashabi, Ellyvon Pranita, Zintan Prihatini, Haryanti Puspa Sari, Ade Miranti Karuania Sari, Kiki Safitri, Elsa Catriana, Rully R. Ramli, Yohana Artha Uly, Agustinus Rangga Respati, Isna Rifka Sri Rahayu, Suhaiela Bahfein, Cynthia Lova, Melvina Tionardus, Baharudin Al Farisi, Revi C. Rantung, Firda Janati, Ady Prawira Riandi, Vincentius Mario Atawollo, Donny Dwisatryo Priyantoro, Gilang Satria, Ruly Kurniawan, Dio Dananjaya, Muhammad Fathan Radityasani, Aprida Megananda, Erwin Setiawan, Dicky Aditya Wijaya, Gading Perkasa, Wasti Samaria Simangunsong, Faqihah Muharroroh Itsnaini, Krisda Tiofani, Suci Wulandari Putri, Bill Clinten, Kevin Rizky Pratama, Galuh Putri Riyanto, Lely Nur Hidayah, Caroline Saskia Tanoto, Farahdilla Puspa, M. Hafidz Imaduddin, Ahmad Zilky, Aniza Pratiwi, Nabilla Ramadhian, Lutfia Ayu Azanella, Retia Kartika Dewi, Nur Rohmi Aida, Ahmad Naufal Dzulfaroh, Dandy Bayu Bramasta, Nur Fitriatus Shalihah, Jawahir Gustav Rizal, Rosy Dewi Arianti Saptoyo, Alinda Hardiantoro, Diva Lufiana Putri, Taufieq Renaldi Arfiansyah, Kevin Topan Kristianto, Benediktus Agya P., Akbar Bhayu Tamtomo, Luqman Sulistiawan, dan Ahmad Su'udi.

- h. Video: Sherly Puspita, Oka Ray Pama, Oky Ivan Setiawan, Lusia Kus Anna, Oik Yusuf, Sendy Darlis Alditya P, Aditya Nugraha, Abba Gabrilllin, Adesari Aviningtyas, Elizabeth Prillia Yahya Carvallo, Khairun Alfi Syahri MJ, Okky Mahdi, Rose Komala Dewi, Ira Gita Natalia Sembiring, Adisty Safitri, Adil Pradipta Huwa, Abdul Azis, Bernard Hermanto Siahaan, Alfiyan Oktora Atmajaya, Dina Rahmawati, Farah Chaerunniza, Syalutan Ilham, Nissi Elizabeth, Pramulya Sadewa, Claudia Aviolola, Firda Rahmawan, Yohana Indah Nur Ratri, Talitha Yumnaa, Arie Julianto, Rizkia Shindy, Michaela Winda Saputra, Putri Aulia, Chrisstella Efivania Rosaline, Dariz Kartika Ayu Saputri, Fathira Deiza A, Andreas Lukas Altobeli, Deta Putri S, Yusuf Reza Permadi,

Agung Wisnugroho, Naufal Noorosa Ragadini, Firzha Yuni Ananda Putri, Menika Ambar Sari, Adimas Afif Nugroho, Ivan Khabib Rochman, Armitha Sathi Devi, Agung Setiawan, Anneke Sherina Ramadhani, Novyana Nurmita Dewi, Meiva Jufarani, Annisa Nurmaulia Al Fajri, Musayadah Khusnul Khotimah, Arini Kusuma Jati, Wiyudha Betha Dinaragis, Hanindiya Dwi Lestari, Anggie Puspa Riana, Banatias Nadhira, Lulu Cinantya Mahendra, Novan Astono Hervianto, Frederikus Tuto Ke Soromaking, Audi Aulia Amanda, Meylis Maurent Hioe, Andre Irwanto, Antonius Aditya Mahendra Budi Santoso, Niken Monica Desiyanti, Conney Stephanie, Mochamad Hildan Farros, Anindhita Izzati Sasilanggeni, Adityo Wisnu Prabowo, Carolus Dori Krisnadi, Rizqina Ninda Aulia, dan Dino Oktaviano Sami Putra.

- i. Media Sosial: Pamela Djajasaputra, Roderick Adrian M, Nibras Nada Nailufar, Dian Reinis Kumampung, Yuna Fikry Adi Pratama, Ari Prasetyo, Ria Wulandari Rachman, Adinda Dwi Putri, Azahra Nisa Puspasari, Ghulam Abdul Malik, Mutiara Godelava Bertha, Miftahul Rizky, Nana Gita Amelia, Rahma Tika Mufida, dan Ricky Arista Kurniawan.
- j. Kontributor: Ari Widodo, Slamet Priyatno, Ika Fitriana, Daspriani Y. Zamzami, Markus Makur, Achmad Faizal, Taufiqurrahman, Ahmad Faisol, Moh. Agus Fauzul Hakim, Junaedi, Abdul Haq Yahya Maulana T., Rahmat Rahman Patty, Hendra Cipto, Sigiranus Marutho Bere, Sudin Syamsuddin, Erna Dwi Lidiawati, Kiki Andi Pati, Dani Julius, Irwan Nugraha, Yustinus Wijaya Kusuma, T. Umar, Firmasnyah, Hendrik Yanto Halawa, Sukoco, Ari Himawan Sarono, Karnia Septia Kusumaningrum, Muhammad Syahri Romdhon, Mansur, Mei Leandha Rosyanti, Yamin Abdul Hasan, Dendi Ramdhani, Masriadi, Amrizza Nursatria Hutagalung, Slamet Widodo, Rosyid A. Azhar, Iwan Bahagia S.P., Defriatno Neke, Budiyanto, Syarifudin, Heru Dahnur, Hamzah Arfah, Muhlis Al Alawi, Putra Prima Perdana, Markus Yuwono, Puthut

Dwi Putranto Nugroho, Ari Maulana Karang, Citra Indriani, Mohamad Iqbal Fahmi, Rahmadhani, Kurnia Tarigan, Hadi Maulana, Labib Zamani, Farida, Agie Permadi, Chermanto Tjaombah, Fitri Rachmawati, Aji Yulianto Kasriadi Putra, Amran Amir, Idon, Ghinan Salman, Moh. Syafi'i, Candra Nugraha, Nansianus Taris, Acep Nazmudin, Aam Aminullah, Skivo Marcelino Mandey, Perdana Putra, Hendri Setiawan, Afdhalul Ikhsan, Dhias Suwandi, FirmanTaufiqurrahman, Himawan, Fadlan Mukhtar Zain, Idham Khalid, Oryza Pasaribu, Hendra Cipta, Dewantoro, Andi Muhammad Haswar, Zakarias Demon Daton, Tri Purna Jaya, Tresno Setiadi, Dian Ade Permana, Bagus Supriadi, Maichel, Suwandi, Jaka Hendra Baittri, Teguh Pribadi, Rasyid Ridho, Ahmad Zulfiqor, Wisang Seto Pangaribowo, Hamim, Mohamad Umar Alwi, Aria Rusta Yuli Pradana, Usman Hadi, Asip Agus Hasani, Muchlis, Ach. Fawaidi, Daniel Pekuwali, Imron Hakiki, Nugraha Perdana, Fristin Intan Sulistyowati, Mohamad Adlu Raharusun, Susi Gustiana, Ahmad Muzakki Al Hasan, Elhadif Putra, Miftahul Huda, Sabriana Mutiara Fitri, Bayu Apriliano, M. Elgana Mubarokah, Serafinus Sandi Hayon Jehadu, Muchamad Dafi Yusuf, Fuci Manupapami, Roberthus Yewen, Ahmad Riyadi, Yohanes Valdi Seriang Ginta, Baktiawan Candheki, Bagus Puji Panuntun, Junaidin, Rizki Alfian Restiawan, Titis Anis Fauziyah, Monika Novena Yunita R., Nadia Faradiba, Ramdhan Triyadi Bempah, Ericssen, Krisna Diantha Akassa, Suci Rahayu, dan Adil Nursalam.

3. Jenis-Jenis Media Kompas

Secara umum, jenis media yang berada di bawah Kompas ada beberapa macam. Berikut adalah jenis-jenis media yang berada dibawah naungan Kompas.

- a. Portal Berita Online (Kompas.com, Kompas. id)

Portal berita online Kompas merupakan platform berita online yang menyajikan berbagai berita aktual dengan cakupan yang luas, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, hingga teknologi dan gaya hidup. Portal-portal berita online ini diperbarui secara real-time dan menggunakan pendekatan jurnalisme digital. Kompas menyajikan berita dengan dukungan visualisasi berita berupa foto, video, dan infografis. Kompas juga memiliki kanal-kanal khusus seperti News, Regional, Nasional, Internasional, Politik, Ekonomi, dan lainnya dalam portal-portal berita online-nya.

b. Televisi (Kompas TV)

Kompas memiliki media pertelevisian di tanah air, yakni Kompas TV. Kompas TV adalah entitas penyiaran televisi. Meskipun entitas penyiaran televisi, konten-kontennya juga diunggah dan dapat diakses melalui media-media Kompas lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada integrasi antara media televisi dan media digital lainnya. Publik dapat mengakses program-program, berita video, dan liputan langsung Kompas TV melalui media Kompas lainnya. Misal, mengaksesnya melalui situs youtube milik Kompas atau portal berita online milik Kompas.

c. Saluran Digital

Kompas juga memiliki media berupa saluran youtube. Kompas memanfaatkan YouTube sebagai media penyiaran kedua. Kompas menyiarkan siaran ulang atau siaran langsung acara televise. Selain itu, Kompas juga membuat konten video digital khusus. Kanal YouTube milik Kompas merupakan salah satu kanal berita Indonesia dengan jangkauan yang tinggi di platform tersebut.

d. Media Sosial

Kompas juga memiliki beberapa media dalam bentuk media sosial. Selain situs web utama, media-media Kompas juga aktif mendistribusikan konten melalui berbagai kanal media sosial. Media

sosial seperti Instagram dan X (Twitter) dimanfaatkan untuk menyebarluaskan konten-konten yang biasanya sudah dipublikasikan di kanal digital Kompas. Hal tersebut memungkinkan pembaca untuk mendapatkan notifikasi berita terbaru dan menikmati berita dengan mudah.

e. Surat Kabar

Kompas merupakan salah satu media surat kabar yang sudah sangat lama. Sebelum mengalami digitalisasi, Kompas pertama kali bergerak sebagai media massa cetak.

B. Media tvOneNews

1. Sejarah tvOneNews

Media tvOneNews merupakan bagian dari media TvOne yang bergerak di situs YouTube. Media tvOne sebelumnya dikenal dengan nama Lativi. Lativi didirikan oleh Abdul Latief yang dikenal sebagai pengusaha ternama Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja era Orde Baru. Lativi mengudara pertama kali secara uji coba pada tanggal 17 Januari 2002. Lativi resmi diluncurkan pada tanggal 30 Juli 2002. Pada saat itu, Lativi termasuk dalam gelombang baru stasiun televisi yang mendapatkan izin siaran nasional. Akan tetapi, Lativi mengalami krisis keuangan yang cukup serius pada tahun 2007. Salah satu sumber masalahnya adalah kredit macet senilai 328 miliar rupiah dengan Bank Mandiri. Akibat krisis keuangan dan lemahnya pengelolaan, status kepemilikan stasiun ini berpindah tangan ke perusahaan milik Aburizal Bakrie. Lativi kemudian melakukan rebranding menjadi tvOne di bawah naungan Grup Bakrie (Al-Hakim, 2020).

Media tvOne mengudara pertama kali pada tanggal 14 Februari 2008. Peresmian siaran perdana ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TvOne juga

mencatatkan diri sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia yang diluncurkan secara resmi dari Istana Negara. Hal tersebut menjadikan tvOne sebagai pionir dalam hal simbolisasi hubungan antara media dan kekuasaan negara.

Sejak awal kehadirannya, tvOne telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menginspirasi masyarakat Indonesia. Media tvOne mengklasifikasikan program-programnya ke dalam kategori *News*, *Sports*, dan *Current Affairs*. Format penyajian tvOne hadir dengan konsep yang inovatif dan berbeda. Tagline awal "MEMANG BEDA" tercermin dalam program-program yang unik. Misal, Apa Kabar Indonesia yang dikemas dalam bentuk tayangan diskusi ringan bertopik hangat dan disiarkan langsung dari studio luar setiap pagi. Selain itu, deretan program hardnews seperti Kabar Pagi, Kabar Petang, Kabar Malam, dan Kabar Terkini memperlihatkan gaya kemasan berita yang berbeda dengan stasiun televisi lainnya dan memiliki ciri khas (TvOneNews, 2025).

Adanya dorongan untuk menjangkau audiens lebih luas membuat tvOne terus bertransformasi, khususnya menyediakan platform online. TvOne telah menyuguhkan beragam video peristiwa terkini yang secara cepat tersaji di layar kaca. Akan tetapi, permintaan untuk menyediakan saluran siaran 24 jam juga bermunculan. Media tvOne berusaha menjawab tingginya permintaan akan tayangan berita yang terus menerus tersedia. Arus informasi yang deras, khususnya dari media sosial, menuntut tvOne untuk selalu memperbarui konten dan bergerak lebih cepat. Hal tersebut mendorong transformasi TvOne menjadi media yang memanfaatkan platform media online. TvOne menjadi media yang mengintegrasikan berbagai platform seperti video, teks, dan digital. Melalui media tvOneNews di youtube, tvOne telah mengikuti perkembangan era konvergensi dan efisiensi media (TvOneNews, 2025).

2. Struktur Kepengurusan tvOneNews

- a. Direktur Utama: Ahmad R. Widarma
- b. Dewan Redaksi: Lalu Mara Satriawangsa
- c. Pimpinan Redaksi: Ecep Suwardaniyasa Muslimin
- d. Redaktur Pelaksana: Chandra Hendrik Hasudungan Manurung, Irianto Susilo, Fauzie Pradita Abbas, Bajo Winarno, Muhammad Ivan Rida, Fikri Syaukani, Budi Zulkifli, Hentty Kartika, Muhammad Takbir, Fajar Sodik, Josua Jon Crissandro, dan Cahyo Junaedy.
- e. Koordinator Liputan: Sukardani.
- f. Sekretariat Redaksi: Satria Aji Prasojo, Caren Gloria Jessica, dan Rike Yuristika.
- g. Redaktur: Ervan Bayu Setianto, Putri Rani, Luthfi Khairul Fikri, Subhan Wirawan, Novianti Siswandini, Mumu Mujahidin, Aqmarul Akhyar, Langgeng Kusdiantoro, Rizki Amana, Inas Widyanuratikah, Reni Ravita Pajri, Hartifiany Praisra, Ferdyan Adhy Nugraha, Muhammad Indmas, Akmal Ghani, Karina Maghvira R, Ammar Ramzi, Farhan Alam, Ahmad Imanuddin, Gigih Wahyuningsih, Adeline Kinanti, Farhan Erlangga, Rahayu Trisna Sari, Anisa Sri Isnaini, Hilal Aulia Pasha, Reinaldy Darius, Dean Pahrevi, Hansen Sinaga, Rilo Pembudi, Hanny Nur Fadhilah, Kevi Laras Wana, Tesya Juwita Larasati, Angelia Nafriana, Ines Melia Suseno, Nurkorida Aeni, Azahra Salsabilla, Nadia Riska Nurlutfianti, Maulana Yusuf, dan Nabila Hanum.
- h. Reporter: Syifa Aulia, Abdul Gani Siregar, Rika Pangesti, Aldi Herlanda, Ilham Giovani Pratama, dan Adinda Ratna Safira.
- i. Fotografer: Julio Trisaputra.
- j. Biro & Koresponden
 - 1) Jabar & Banten: Refiano Wahyudianto, Ilham Ariansyah, dan M. Sofyan Limpong.
 - 2) Jateng & DI Yogyakarta: Danitha Riyandini, Arga Dumadi, dan Sri Cahyani.

- 3) Jatim: Goldhi Gumlilang dan Farah Manhillah.
 - 4) Sumatera: Sri Wanasari dan Nofri Arfandi..
 - 5) Sulawesi: Samsul Maarif dan Firda Jumardi.
 - 6) Mancanegara: Yanri Subekti (New York) dan Miranti Hirschman (Berlin).
- k. Editor Konten Video: Adri Sagita, Uji Kahono, Agus Maulana, Muhammad Sandy Pradoto, Yubi Taufikullah Detria, Fadel Muhamad, Muhamad Emiriza Muhamad Bagus Ardianto, Tiar Oktavio, Mahezra Sitompul, Febrian Ramadhan, Nasya Sabilah, Rahmatia Aulia, Lidia Syafitri, Ria Tri Rahayu, Andi Achmad Maulana, Firman, Bachtiar Kurnia Sandy, Siti Nurul Alifah, Sulthon Syahdila Ramadhan, Hasbi Hasbullah Hadiansyah, Ulfa, Indah Jelita, Aprizal Soleh, Hadi Ramadhan, dan Ahmad Rohaefi.
 - l. Sosial Media: Shafa Bella Rizqullah, Siti Astria Nun Cahyani, dan Indri Septi Astuti
 - m. Desain Grafis: Muhammad Rheza, Raihan Omar Budihawali, Zidane Rizqi Abdurrahman Rodja, dan Wildan Mustofa.
 - n. Data Analis: Muhammad Haikal, Muhammad Arif Wibisono, dan Wahid Nurul Hidayat.

3. Jenis-Jenis Media tvOne

Secara umum, jenis media yang berada di bawah tvOne ada beberapa macam. Berikut adalah jenis-jenis media yang berada dibawah naungan tvOne.

a. Portal Berita Online (tvonewsonline.com)

Portal berita online tvOne merupakan platform berita online yang tvOne buat untuk menjangkau pemirsa digital. Portal berita tvOne menyajikan berbagai berita mencakup isu nasional, regional maupun internasional. Selain itu, portal tersebut juga memiliki kategori tema

yang cukup beragam mulai dari hukum, ekonomi, politik, olahraga hingga hiburan. Artikel berita portal ini merupakan versi tertulis dari siaran televisi. Akan tetapi, portal berita ini memiliki tim editorial khusus untuk penulisan berita online.

b. Televisi (tvOne)

Media tvOne juga memiliki media pertelevisian di tanah air seperti Kompas. Televisi merupakan siaran media utama tvOne. Siaran tvOne berfokus pada berita terkini dan debat politik. Media tvOne bahkan memiliki program-program unggulan seperti Apa Kabar Indonesia dan Indonesia Lawyers Club (ILC). Program-program tersebut menjadikan tvOne identik dengan berita cepat dan diskusi publik yang melibatkan para elit politik, hukum, dan tokoh masyarakat.

c. Saluran Digital

Media tvOne juga secara aktif memanfaatkan YouTube sebagai media penyiaran kedua. Media tvOne menyiarkan siaran ulang atau siaran langsung acara televisi. Selain itu, tvOne juga membuat konten-konten eksklusif di platform youtube-nya. Channel youtube tvOneNews merupakan salah satu kanal berita Indonesia dengan jangkauan yang luas di platform youtube.

d. Media Sosial

Media tvOne juga memiliki beberapa media dalam berbagai platform media sosial. Media tvOne memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan X (Twitter) untuk membagikan klip video, berita pendek, dan infografis. Media sosial memiliki peran sebagai alat untuk memperkuat informasi. Selain itu, media sosial juga berperan dalam membangun engagement dengan pengguna internet, khususnya kelompok usia muda.

BAB IV

FRAMING YANG DICIPTAKAN OLEH MEDIA KOMPAS.COM DAN TVONENEWS TERKAIT BERITA DINAMIKA RUU PILKADA

Bab ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi framing berita media online. Bab ini akan menganalisis media online Kompas.com dan tvOneNews dalam membangun framing berkaitan berita RUU Pilkada 2024. Belum lama ini, adanya wacana RUU Pilkada pada tahun 2024 sangat membuat resah rakyat Indonesia. Media-media online yang memberitakan fenomena tersebut memainkan peran dalam membentuk opini publik. Penelitian ini akan melihat bagaimana media online dalam hal ini Kompas.com dan tvOneNews menciptakan atau membangun framing pemberitaan terkait dinamika RUU Pilkada.

Dalam kajian komunikasi politik, framing memiliki peran yang sangat penting. Framing dapat berperan dalam mengonstruksi atau membangun realitas sosial. Selain itu, framing juga dapat mempengaruhi persepsi, agenda maupun prioritas publik. Analisis framing dianggap menjadi hal yang penting dalam memahami konstruksi berita media. Pada bab ini peneliti akan melakukan analisis framing terhadap pemberitaan RUU Pilkada 2024 yang dilakukan media Kompas.com dan tvOneNews. Metode analisis framing Robert Entman akan digunakan untuk membedah sudut pandang yang media Kompas.com dan tvOneNews ciptakan melalui framing pemberitaannya. Total terdapat dua puluh artikel dan konten berita yang akan dianalisis menggunakan teori analisis framing Robert Entman.

Robert M. Entman memandang framing sebagai cara penting bagi media dalam membentuk opini publik dan hasil politik (Entman, 2013). Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa analisis framing model Entman sebagai model yang paling relevan untuk digunakan sebagai alat menganalisis framing berita politik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya elemen berupa *make moral judgement* dan *suggest remedies* dalam

kerangka analisisnya. Dua elemen tersebut adalah kunci untuk melihat bagaimana sikap media terhadap fenomena atau masalah, dalam hal ini masalah politik.

A. Konteks Sosial dan Politik Pemberitaan RUU Pilkada 2024

1. Latar Belakang RUU Pilkada 2024

RUU Pilkada 2024 adalah revisi undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten atau kota dan akan disahkan pada tahun 2024. RUU Pilkada pertama kali muncul ke publik pada tanggal 21 Agustus 2024. Dalam sebuah rapat baleg DPR, draft RUU Pilkada ditampilkan dan dibahas. Draft RUU Pilkada saat itu menjadi viral dan penuh kontroversi. Hal ini dikarenakan DPR dianggap mengabaikan putusan MK dan berusaha mencederai konstitusi. DPR lebih memilih mengacu pada putusan MA dan mengabaikan putusan MK yang harusnya bersifat final dan mengikat.

Pada tanggal 29 Mei 2024, MA mengeluarkan putusan nomor 23 P/HUM/2024. MA mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Putusan tersebut mengatur batas minimum usia untuk gubernur dan wakil gubernur berumur 30 tahun saat dilantik (MAHKAMAH AGUNG, 2024). Selain MA, terdapat MK yang juga menguji perkara berkaitan Pilkada. MK menguji gugatan mengenai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berbeda dengan putusan MA, MK memutuskan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia 30 tahun saat ditetapkan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut termuat dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK

mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Gelora dan Partai Buruh (MAHKAMAH KONSTITUSI, 2024).

B. Analisis *Framing Artikel Berita Kompas.com terkait RUU Pilkada 2024*

Penulis melakukan penyortiran terhadap artikel-artikel berita terkait polemik RUU Pilkada yang diterbitkan media *online* Kompas.com. Penulis memilih delapan belas artikel berita Kompas.com berdasarkan preferensi penulis. Selain itu, delapan belas artikel berita tersebut dipilih penulis sesuai tiga periode pemberitaan, masa awal kemunculan, puncak ketegangan, dan pasca pembatalan pengesahan RUU Pilkada. Berikut adalah rincian delapan belas artikel berita polemik RUU Pilkada 2024 yang diterbitkan media *online* Kompas.com.

Tabel 4. 1 Daftar Artikel Berita Kompas.com Terpilih

No.	Judul Artikel Berita	Tanggal Terbit
1	Dapat Informasi Baleg Bahas RUU Pilkada Besok, PDIP: “Jangan Coba Permainkan Kedaulatan Rakyat”	20 Agustus 2024, pukul 21.16 WIB.
2	Fraksi PDIP Sebut Pembahasan RUU Pilkada 2024 Bertentangan dengan Putusan MK	21 Agustus 2024, pukul 15.50 WIB.
3	MK Tak Boleh Komentari soal Pembahasan RUU Pilkada di DPR	21 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB.
4	DPR Kebut Bahas RUU Pilkada untuk lawan Putusan MK, Bivitri: “Kegilaan” yang Perlu Diluruskan	21 Agustus 2024, pukul 17.12 WIB.
5	RUU Pilkada yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok dalam Rapat Paripurna	21 Agustus 2024, pukul 19.05 WIB.
6	DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDI-P yang Menolak	21 Agustus 2024, pukul 19.24 WIB.
7	Jokowi Bahas Tambang di Istana saat Rakyat Demo Kawal Putusan MK	22 Agustus 2024, pukul 13.23 WIB.
8	Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ketua BEM UI: Hanya untuk Meredam	22 Agustus 2024, pukul 14.04 WIB.

9	Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ray Rangkuti: Itu Taktik agar Adem	22 Agustus 2024, pukul 15.06 WIB.
10	Mahasiswa yang Demo di DPR Saling Mengingatkan “Hati-Hati Provokasi”	22 Agustus 2024, pukul 16.15 WIB.
11	Kecurigaan Publik Kian Memuncak Usai DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada	22 Agustus 2024, pukul 16.40 WIB.
12	Dasco Bantah DPR Batal Sahkan RUU Pilkada karena Eskalasi Demo	22 Agustus 2024, pukul 19.20 WIB.
13	Perlawanan Sehari Kawal Putusan MK, RUU Pilkada Batal Disahkan	22 Agustus 2024, pukul 19.22 WIB.
14	Perlawanan Rakyat Sukses Buat RUU Pilkada Batal Disahkan, Mahfud: Rakyat Tak Bodoh	23 Agustus 2024, pukul 16.35 WIB.
15	Keraguan Publik atas Janji KPU Patuhi Putusan MK	24 Agustus 2024, pukul 05.30 WIB.
16	Publik Diminta Jangan Mau Dininabobokan DPR-KPU, Tetap Kawal Putusan MK	24 Agustus 2024, pukul 10.49 WIB.
17	Ombudsman Temukan Pelanggaran Pengamanan Aksi Demonstrasi Penolakan RUU Pilkada	26 Agustus 2024, pukul 16.02 WIB.
18	Isu RUU Perampasan Aset Dianggap Serangan Balik Jokowi Usai DPR Gagal Loloskan RUU Pilkada	30 Agustus 2024, pukul 15.29 WIB.

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 17 Juni 2025

Delapan belas artikel berita yang terpilih akan penulis petakan berdasarkan dimensi entman. Pemetaan ini bertujuan untuk mempermudah analisis framing teks berita Kompas.com.

a. *Define problem*

- Dapat Informasi Baleg Bahas RUU Pilkada Besok, PDIP: “Jangan Coba Permainkan Kedaulatan Rakyat”.
- RUU Pilkada yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok dalam Rapat Paripurna.
- Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ketua BEM UI: Hanya untuk Meredam.

- Perlawanan Sehari Kawal Putusan MK, RUU Pilkada Batal Disahkan.

b. *Diagnose Cause*

- DPR Kebut Bahas RUU Pilkada untuk lawan Putusan MK, Bivitri: “Kegilaan” yang Perlu Diluruskan.
- Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ray Rangkuti: Itu Taktik agar Adem.
- Dasco Bantah DPR Batal Sahkan RUU Pilkada karena Eskalasi Demo.
- Kecurigaan Publik Kian Memuncak Usai DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada.
- Perlawanan Rakyat Sukses Buat RUU Pilkada Batal Disahkan, Mahfud: Rakyat Tak Bodoh.

c. *Make Moral Judgement*

- Fraksi PDIP Sebut Pembahasan RUU Pilkada 2024 Bertentangan dengan Putusan MK.
- MK Tak Boleh Komentari soal Pembahasan RUU Pilkada di DPR.
- Jokowi Bahas Tambang di Istana saat Rakyat Demo Kawal Putusan MK.
- Ombudsman Temukan Pelanggaran Pengamanan Aksi Demonstrasi Penolakan RUU Pilkada.
- Isu RUU Perampasan Aset Dianggap Serangan Balik Jokowi Usai DPR Gagal Loloskan RUU Pilkada.

d. *Suggest Remedies*

- DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDI-P yang Menolak.
- Mahasiswa yang Demo di DPR Saling Mengingatkan “Hati-Hati Provokasi”.

- Keraguan Publik atas Janji KPU Patuhi Putusan MK.
- Publik Diminta Jangan Mau Dininabobokan DPR-KPU, Tetap Kawal Putusan MK!

Delapan belas artikel berita yang telah dipeta-petakan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis *framing*. Selain itu, penulis akan menggunakan teori analisis *framing* menurut Robert Entman dalam membedah artikel berita Kompas.com. Penulis akan membedah artikel berita mulai dari aspek seleksi isu hingga aspek-aspek penonjolan sesuai teori analisis *framing* Entman. Entman mengungkapkan ada empat aspek atau elemen *framing* seperti *define problems*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, dan *suggest remedies*. Berikut adalah rincian analisis *framing* artikel berita Kompas.com sesuai teori analisis *framing* Entman.

1. Pola Pemberitaan Kompas.com dalam Menyikapi RUU Pilkada 2024

Penulis akan mengulas bagaimana media Kompas.com menonjolkan beberapa aspek dalam polemik revisi Undang-Undang Pilkada 2024 lalu. Kompas.com konsisten selama tiga periode pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024 dengan memilih judul-judul yang bernarasi penolakan dan pertentangan. Misal, artikel berita yang berjudul “*RUU Pilkada yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok dalam Rapat Paripurna*”. Selain itu, terdapat artikel-artikel berita lainnya yang bernuansa penolakan revisi UU Pilkada 2024. Artikel berita Kompas.com tersebut seperti artikel berita yang berjudul “*Kecurigaan Publik Kian Memuncak Usai DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada*” dan “*Perlawanan Sehari Kawal Putusan MK, RUU Pilkada Batal Disahkan*”. Dalam pemilihan judul, Kompas.com memilih menyoroti RUU yang menimbulkan kontroversi dan mengalami penolakan oleh masyarakat.

Media Kompas.com juga lebih sering menampilkan suara-suara oposisi. Kompas.com mengemasnya melalui pemilihan-pemilihan

narasumber yang cenderung menolak RUU Pilkada. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa artikel berita yang Kompas.com terbitkan. Misal, artikel berita yang berjudul “*Fraksi PDIP Sebut Pembahasan RUU Pilkada 2024 Bertentangan dengan Putusan MK*”, “*MK Tak Boleh Komentari Soal Pembahasan RUU Pilkada di DPR*”, “*DPR Kebut Bahas RUU Pilkada untuk lawan Putusan MK, Bivitri: “Kegilaan” yang Perlu Diluruskan*”, “*Perlawaan Rakyat Sukses Buat RUU Pilkada Batal Disahkan, Mahfud: Rakyat Tak Bodoh*”, dan “*Publik Diminta Jangan Mau Dininabobokan DPR-KPU, Tetap Kawal Putusan MK!*”.

Gambar 4. 1 Artikel Berita Kompas.com Ketiga



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Selain aspek pemilihan judul, penulis akan mengulas bagaimana pemilihan gambar dalam artikel berita Kompas.com. Media Kompas.com menekankan gambar yang membingkai narasi penolakan terhadap revisi UU Pilkada. Misal, pembingkaian artikel berita yang berisi penolakan masyarakat Indonesia yang menolak RUU Pilkada 2024. Artikel berita tersebut berjudul “*Mahasiswa yang Demo di DPR Saling Mengingatkan “Hati-Hati Provokasi”*” atau “*Keraguan Publik atas Janji KPU Patuhi Putusan MK*”. Kompas.com menonjolkan aspek-aspek yang bernuansa perlawanan terhadap wacana RUU Pilkada 2024.

Gambar 4. 2 Artikel Berita Kompas.com Kesepuluh



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Selain itu, pemilihan gambar untuk membingkai pendapat tokoh atau pengamat yang kontra terhadap RUU Pilkada 2024. Hal tersebut terdapat pada artikel berita yang berjudul "*Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ray Rangkuti: Itu Taktik agar Adem*".

Gambar 4. 3 Artikel Berita Kompas.com Kesembilan



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Dalam perspektif teori analisis *framing* Robert Entman, proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek baik melalui gambar, bahasa hingga

narasumber merupakan langkah nyata dari mekanisme *framing* yang secara langsung mempengaruhi persepsi publik dalam memaknai suatu isu. Dalam pemberitaan RUU Pilkada 2024, media Kompas.com secara konsisten menonjolkan aspek kontroversi dan penolakan melalui pemilihan judul yang konfrontatif. Misal, “*RUU Pilkada yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok dalam Rapat Paripurna*” dan “*Sehari Perlawanan Kawal Putusan MK, RUU Pilkada Dibatalkan*”. Penekanan pada diktum seperti anulir putusan, rakyat tak bodoh, perlawanan sukses, dan kawal putusan MK merupakan strategi *framing* yang mengarahkan publik untuk memahami RUU Pilkada sebagai masalah serius yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

Media Kompas.com juga secara aktif membangun *framing* melalui pemilihan narasumber dan penggunaan gambar. Kompas.com lebih sering menampilkan suara oposisi seperti Ray Rangkuti, Mahfud MD, dan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang kritis terhadap RUU Pilkada. Selain itu, penggunaan gambar yang menunjukkan demonstrasi mahasiswa dan ekspresi skeptis masyarakat terhadap KPU dan DPR merupakan bentuk penekanan visual untuk mendukung pembingkaian naratif. Keseluruhan strategi *framing* ini menunjukkan bahwa Kompas.com membingkai polemik RUU Pilkada dalam kerangka kritik politik yang berpihak pada masyarakat sipil dan konstitusi.

2. Elemen-Elemen *Framing* Pemberitaan RUU Pilkada 2024 Media Kompas.com

a. Define Problems

Peneliti membagi tiga periode pendefinisian masalah dalam pemberitaan mengenai polemik RUU Pilkada 2024. Pertama, periode awal kemunculan polemik tersebut. Pada aspek *define problems* pemberitaan periode pertama, media Kompas.com mendefinisikan masalah RUU Pilkada sebagai persoalan publik yang penting untuk

dipantau. RUU Pilkada dianggap sebagai senjata yang akan menganulir putusan MK berkaitan ambang batas usia pencalonan pada Pilkada 2024. Hal tersebut termuat dalam beberapa artikel berita Kompas.com. Misal, artikel berita yang berjudul “*DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDIP yang Menolak*” dan “*RUU Pilkada yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok dalam Rapat Paripurna*”.

Gambar 4. 4 Artikel Berita Kompas.com Kelima



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Artikel di atas membingkai *define problems* dengan RUU Pilkada sebagai undang-undang yang dikebut untuk manganulir putusan MK. Artikel ini melihat upaya Baleg DPR yang berusaha mempercepat RUU Pilkada setelah Putusan MK berkaitan ambang batas usia pencalonan kepala daerah. Kedua, pada periode puncak ketegangan dimana Kompas.com menekankan bahwa penundaan RUU Pilkada merupakan taktik untuk meredam situasi yang memanas pada artikel berita lainnya. Artikel berita tersebut berjudul “*Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ketua BEM UI: Hanya untuk Meredam*”.

Gambar 4. 5 Artikel Berita Kompas.com Kedelapan



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Artikel di atas membingkai *define problems* dengan penundaan RUU Pilkada sebagai sebagai strategi meredam situasi yang semakin memanas. Artikel ini melihat upaya DPR yang berusaha meredam amarah mahasiswa melalui penundaan pengesahan RUU Pilkada yang tidak sesuai dengan Putusan MK. Ketiga, pada periode pasca pembatalan pengesahan RUU Pilkada dimana Kompas.com mendefinisikan masalah RUU Pilkada sebagai kontroversi publik berhasil digagalkan. Artikel berita tersebut berjudul “*Perlawan Sehari Kawal Putusan MK, RUU Pilkada Batal Disahkan*”.

Gambar 4. 6 Artikel Berita Kompas.com Ketiga Belas



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Define problems pada artikel di atas membingkai pembatalan pengesahan RUU Pilkada yang telah menimbulkan persoalan publik. Artikel ini menyoroti perlawanan publik yang berhasil. Perlawanan publik dilakukan demi mengawal putusan MK dan menolak RUU Pilkada. Sejalan dengan artikel-artikel berita di atas, artikel berita Kompas.com lainnya cenderung membingkai *define problems* dengan RUU Pilkada 2024 yang penuh kontroversi. RUU Pilkada dijadikan sebagai alat untuk membatalkan putusan MK berkaitan ambang batas usia pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.

Dalam kerangka teori analisis *framing* Robert Entman, elemen *define problems* menjadi kunci penting dalam menentukan makna dasar suatu peristiwa yang dipublikasikan oleh media. Dalam konteks pemberitaan polemik RUU Pilkada, Kompas.com tidak mengarahkan konstruksi masalah pada aspek teknis legislasi saja. Akan tetapi, Kompas.com lebih fokus pada isu substantif yang menyangkut integritas dan legitimasi demokrasi. Kompas.com secara konsisten membingki pendefinisian masalah dengan RUU Pilkada sebagai ancaman terhadap putusan MK.

Kompas.com menyoroti yang menjadi masalah bukan hanya rancangan undang-undangnya. Akan tetapi, terdapat masalah berupa proses politik di baliknya yang dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi dan putusan MK. Kompas.com secara konsisten mendefinisikan masalah sebagai upaya politik manipulatif untuk melemahkan prinsip keadilan pemilu. *Framing* ini menunjukkan bahwa media menitikberatkan pada dimensi moral dan demokrasi dalam membungkai masalah. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Entman bahwa pendefinisian masalah melibatkan keputusan tentang apa yang penting dan mengapa hal itu penting.

b. *Diagnose Cause*

Peneliti membagi tiga periode dalam pemberitaan mengenai polemik RUU Pilkada 2024. Pertama, periode awal kemunculan polemik tersebut. Pada periode ini, media Kompas.com membungkai sumber masalahnya adalah RUU Pilkada yang tidak sesuai putusan MK. Selain itu, proses pembahasan RUU Pilkada 2024 yang tergesa-gesa juga menjadi sumber masalah lainnya. RUU Pilkada 2024 dibahas tidak lama setelah putusan MK berkaitan ambang batas usia pencalonan kepala daerah. Selain itu, DPR dan pemerintah tidak mengacu pada putusan MK dalam membuat draf RUU Pilkada berkaitan ambang batas usia pencalonan. Kompas.com menyoroti draft RUU Pilkada yang disiapkan sebagai respons terhadap putusan MK yang mengatur batasan usia dan menganulir putusan MK. Misal, artikel berita yang berjudul “*DPR Kebut Bahas RUU Pilkada untuk lawan Putusan MK, Bivitri: “Kegilaan” yang Perlu Diluruskan*”.

Gambar 4. 7 Artikel Berita Kompas.com Keempat



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Kedua, *diagnose cause* pada periode puncak ketegangan polemik RUU Pilkada cenderung fokus pada taktik DPR meredam situasi. Misal, artikel berjudul "*Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Ray Rangkuti: Itu Taktik agar Adem*". Artikel tersebut melihat bahwa RUU Pilkada menjadi alasan publik marah dan melakukan perlawanan. Penundaan pengesahan RUU Pilkada dapat dianggap sebagai strategi menunggu momentum yang pas. Hal senada ditemukan dalam artikel berita lainnya. Misal, "*Kecurigaan Publik Kian Memuncak Usai DPR Tunda Pengesahan RUU PIlkada*" dan "*Dasco Bantah DPR Batal Sahkan RUU Pilkada karena Eskalasi Demo*".

Gambar 4. 8 Artikel Berita Kompas.com Kesebelas



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Terakhir, periode pasca pembatalan pengesahan dimana Kompas.com mendagnosa penyebab masalah terletak pada Pembahasan RUU Pilkada yang tergesa-gesa. Misal, dalam artikel berita Kompas.com dengan judul "*Perlawanan Rakyat Sukses Buat RUU Pilkada Batal Disahkan, Mahfud: Rakyat Tak Bodoh*". Selain itu, proses revisi UU Pilkada digunakan sebagai senjata menganulir putusan MK. Putusan MK seharusnya sudah bersifat final dan mengikat. Tindakan DPR mengabaikan putusan MK dapat diartikan penolakan terhadap putusan tersebut. Sejalan dengan artikel-artikel berita di atas, Kompas.com cenderung membingkai diagnose cause dengan RUU Pilkada yang tidak sesuai putusan MK.

Gambar 4. 9 Artikel Berita Kompas.com Keempatbelas



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Dalam kerangka teori analisis *framing* Robert Entman, elemen *diagnose cause* merujuk pada identifikasi kondisi, aktor atau proses yang dianggap menjadi penyebab masalah. Dalam memberitakan RUU Pilkada 2024, Kompas.com secara konsisten dalam tiga periode pemberitaannya membingkai penyebab utama polemik tidak hanya pada substansi RUU itu sendiri. Akan tetapi, proses pembahasannya juga dianggap bermasalah. Hal tersebut dikarenakan tidak merujuk pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Kompas.com mengonstruksi bahwa sumber masalahnya ada pada aktor-aktor yang berkuasa yang menyimpang dari norma hukum dan etika berdemokrasi. Framing ini menunjukkan bahwa media menempatkan DPR dan pemerintah sebagai sumber masalah. DPR dan Pemerintah pusat dianggap sebagai pihak yang sengaja menyusun revisi UU Pilkada secara tergesa-gesa dan tidak transparan untuk kepentingan politik tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Entman bahwa dalam mendiagnosis penyebab, media tidak hanya mengidentifikasi apa penyebabnya. Akan tetapi, media juga menginterpretasi tindakan para aktor.

c. *Make Moral Judgement*

Selama tiga periode pemberitaan, Kompas.com secara konsisten mengkritik pihak terkait pada aspek *make moral judgement*-nya. Pada aspek *make moral judgement*, media Kompas.com membingkai melalui kritik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam RUU Pilkada 2024. Kompas.com membingkai nilai moral dalam bentuk kritik kepada Baleg DPR dan pemerintah yang berusaha mempercepat pemberlakuan RUU Pilkada. Terdapat beberapa artikel Kompas.com yang mengkritik secara langsung bahwa Baleg DPR berusaha mengakali putusan MK. Misal, dalam artikel berita yang berjudul “*Fraksi PDIP Sebut Pembahasan RUU Pilkada 2024 Bertentangan dengan Putusan MK*” dan “*MK Tak Boleh Komentari Soal Pembahasan RUU Pilkada di DPR*”.

Gambar 4. 10 Artikel Berita Kompas.com Kedua



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Pada aspek *make moral judgement*, artikel ini membingkai nilai moral dalam bentuk kritik kepada DPR. Terdapat indikasi bahwa DPR main-main dan bermain curang dalam urusan RUU Pilkada 2024. Pernyataan bahwa penundaan bisa saja dianggap sebagai langkah untuk menghindari kekacauan yang lebih besar.

Selain itu, artikel Kompas.com juga menampilkan kritik pada pemerintah pusat. Kritik terdapat pada artikel berita yang terbit paska RUU Pilkada batal disahkan. Artikel berita tersebut berjudul “*Jokowi Bahas Tambang di Istana saat Rakyat Demo Kawal Putusan MK*”.

Gambar 4. 11 Artikel Berita Kompas.com Ketujuh



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Artikel ini membingkai nilai moral secara tersirat bahwa tindakan Jokowi merupakan tindakan yang tidak etis. Selain itu, tindakan ini dapat dianggap sebagai rasa kurang simpati terhadap rakyat dan aspirasinya. Oleh karena itu, artikel ini memberikan penilaian moral negatif terhadap tindakan seorang presiden. Kompas.com juga memberikan penilaian moral berupa kritik kepada pengamanan demonstrasi RUU Pilkada. Kritik tersebut terdapat pada artikel yang berjudul “*Isu RUU Perampasan Aset Dianggap Serangan Balik Jokowi Usai DPR Gagal Leloskan RUU Pilkada*” dan “*Ombudsman Temukan Pelanggaran Pengamanan Aksi Demonstrasi Penolakan RUU Pilkada*”.

Gambar 4. 12 Artikel Berita Kompas.com Ketujuhbelas



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Artikel ini membingkai nilai moral yang menganggap bahwa tindakan kekerasan oknum kepolisian melanggar hak asasi. Tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Artikel ini menyiratkan pentingnya menghargai HAM. Selain itu, artikel ini juga menyiratkan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi. Hal senada ditemukan di artikel-artikel Kompas.com lainnya. Media Kompas.com cenderung membingkai *make moral judgement* dalam bentuk kritik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam wacana RUU Pilkada 2024.

Dalam kerangka teori *framing* Robert Entman, elemen *make moral judgement* merujuk pada penilaian normatif yang diberikan media kepada peristiwa, tindakan atau aktor yang diberitakan. Dalam pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024, Kompas.com secara konsisten membingkai melalui narasi yang menilai tindakan pihak-pihak terkait baik DPR, pemerintah pusat maupun aparat. tidak hanya salah secara prosedural. Akan tetapi, tindakan aktor tersebut juga menyimpang secara

moral. Kritik keras terhadap pihak terkait secara eksplisit ditampilkan melalui kutipan wawancara dari tokoh masyarakat sipil.

Framing semacam ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menginformasikan proses legislasi. Akan tetapi, media juga menggarisbawahi bahwa tindakan tersebut bermasalah dari sisi nilai. Entman menjelaskan bahwa unsur membuat penilaian moral tidak hanya memberi nilai pada tindakan, tetapi juga mempengaruhi arah interpretasi publik tentang siapa yang perlu dicurigai dan siapa yang dapat dipercaya. Kompas.com secara aktif membangun narasi moral bahwa polemik RUU Pilkada merupakan ancaman bagi integritas demokrasi melalui kritik terbuka terhadap tindakan elit politik yang dianggap tidak beretika.

d. *Suggest Remedies*

Selama tiga periode pemberitaan, media Kompas.com juga konsisten dalam menyarankan penyelesaian polemik RUU Pilkada 2024. Pada aspek *suggest remedies*, media Kompas.com membingkainya dalam bentuk saran pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024. Kompas.com juga menyarankan solusi berupa patuh pada putusan MK. Hal tersebut termuat dalam artikel-artikel berita yang diterbitkan oleh Kompas.com. Misal, artikel berita yang berjudul “*Dapat Informasi Baleg Bahas RUU Pilkada Besok, PDIP: “Jangan Coba Permainkan Kedaulatan Rakyat”*”.

Gambar 4. 13 Artikel Berita Kompas.com Pertama



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Artikel ini menegaskan bahwa DPR harus menghormati putusan MK. Artikel ini membingkainya dalam bentuk tanggapan Kader PDI-P, yakni Ronny Talapessy. Berikut adalah kutipannya,

“Karena di sinilah kedaulatan rakyat ditunjukkan oleh putusan MK dalam hal ini kita menjaga demokrasi yang ada”.

Selain itu, Kompas.com menyarankan publik untuk terus mengawal pelaksanaan putusan MK. Publik diminta untuk mengawal RUU Pilkada sampai KPU menerbitkan aturan tindak lanjut putusan MK. Hal tersebut termuat dalam artikel berita yang berjudul “Mahasiswa Dyang Demo di DPR Saling Mengingatkan “Hati-Hati Provokasi”” dan “*Keraguan Publik atas Janji KPU Patuhi Putusan MK*”.

Gambar 4. 14 Artikel Berita Kompas.com Kelima Belas



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Artikel ini menegaskan bahwa publik perlu mengawal implementasi putusan MK yang dilakukan KPU secara serius. Artikel ini membingkainya dalam bentuk tanggapan Titi Anggraeni selaku Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem). Berikut adalah kutipannya,

“Jadi kita harus kawal implementasi teknis dari putusan MK pada ranah KPU secara tepat waktu meskipun memang tanpa PKPU pun putusan MK ini serta merta berlaku”.

Gambar 4. 15 Artikel Berita Kompas.com Keenam Belas



Sumber: Kompas.com, 18 Juni 2025

Hal senada ditemukan dalam artikel berita Kompas.com lainnya. Misal, dalam artikel berita yang berjudul artikel ini menyarankan publik untuk terus mengawal putusan MK. Selain itu, artikel ini menegaskan bahwa KPU tetap harus sesuai prosedur dengan melakukan konsultasi dengan DPR. Akan tetapi, KPU tidak terikat dengan hasil rapat konsultasi tersebut. Oleh karena itu, KPU berhak bersikap sendiri setelah rapat dengan DPR. Sejalan dengan artikel-artikel yang dibahas di atas, artikel berita Kompas.com lainnya membingkai aspek *suggest remedies* dalam bentuk saran patuh pada putusan MK.

Dalam kerangka teori analisis *framing* Entman, elemen *suggest remedies* merujuk pada bagaimana media menawarkan solusi dari masalah yang telah dibingkai sebelumnya. Dalam kasus pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024, Kompas.com secara konsisten memerlukan saran pembatalan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pembatalan pengesahan RUU Pilkada. *Framing* ini menunjukkan bahwa penyelesaiannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi normatif dan prinsipil. Dalam perspektif Entman, saran penyelesaian yang dibingkai seperti ini mengandung muatan normatif yang kuat. Hal tersebut dikarenakan tidak hanya menawarkan langkah-langkah taktis. Akan tetapi, mengandung pesan berkaitan nilai-nilai demokrasi yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak.

C. Analisis *Framing* Konten Berita tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024

Penulis juga melakukan penyortiran terhadap konten berita terkait polemik RUU Pilkada 2024 yang diterbitkan media *online* tvOneNews. Penulis melakukan hal yang sama ketika memilih artikel-artikel berita Kompas.com, yakni memilih delapan belas konten berita tvOneNews berdasarkan preferensi penulis. Selain itu, delapan belas konten berita tersebut dipilih penulis sesuai tiga periode pemberitaan, yakni periode awal kemunculan, puncak ketegangan, dan pasca pembatalan pengesahan RUU Pilkada. Berikut adalah rincian delapan

belas konten berita polemik RUU Pilkada 2024 yang ditayangkan media *online* tvOneNews.

Tabel 4. 2 Daftar Konten Berita tvOneNews Terpilih

No.	Judul Konten Berita	Tanggal Terbit
1	Putusan MK Game Changer Pilkada	21 Agustus 2024
2	DPR Bahas RUU Pilkada, PDIP: Bertentangan dengan Putusan MK	21 Agustus 2024
3	Putusan MA dan MK Jadi Perdebatan di Baleg DPR soal RUU Pilkada	21 Agustus 2024
4	Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada	21 Agustus 2024
5	Perubahan UU Pilkada “Potong” Putusan MK?	22 Agustus 2024
6	Revisi Undang-undang Pilkada Beda dengan Putusan MK?	22 Agustus 2024
7	Teriakan “Lawan” Menggema di Depan Gedung DPR	22 Agustus 2024
8	Ikut Aksi Demo di DPR, Reza Rahardian Naik ke Mobil ke Orasi	22 Agustus 2024
9	Mahasiswa di Makasar Demo Tolak RUU Pilkada	22 Agustus 2024
10	Datangi Massa Pendemo di DPR, Habiburokhman Terkena Lemparan	22 Agustus 2024
11	Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Tetap Pakai Putusan MK	22 Agustus 2024
12	KPU akan Tindak Lanjuti Putusan MK Lewat Konsultasi DPR RI	22 Agustus 2024
13	Ini Alasan DPR Batalkan Revisi UU Pilkada	23 Agustus 2024
14	Puan Respons Dinamika Politik Soal Revisi UU Pilkada	23 Agustus 2024
15	KPU Siapkan PKPU usai DPR Batalkan RUU Pilkada	24 Agustus 2024
16	Sufmi Dasco Datangi Polda Metro Jaya untuk Meminta Polisi Bebaskan Pendemo yang Ditahan	24 Agustus 2024
17	Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada 2024	25 Agustus 2024
18	Presiden Jokowi Buka Suara Tanggapi Aksi Demonstrasi RUU Pilkada 2024	28 Agustus 2024

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 16 Juni 2025

Delapan belas artikel berita yang terpilih akan penulis petakan berdasarkan dimensi entman. Pemetaan ini bertujuan untuk mempermudah analisis framing konten berita tvOneNews.

a. *Define problem*

- Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada.
- Revisi Undang-undang Pilkada Beda dengan Putusan MK?
- Teriakan “Lawan” Menggema di Depan Gedung DPR.
- KPU Siapkan PKPU usai DPR Batalkan RUU Pilkada.

b. *Diagnose Cause*

- Putusan MK Game Changer Pilkada.
- Mahasiswa di Makasar Demo Tolak RUU Pilkada.
- Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Tetap Pakai Putusan MK.
- Sufmi Dasco Datangi Polda Metro Jaya untuk Meminta Polisi Bebaskan Pendemo yang Ditahan.
- Presiden Jokowi Buka Suara Tanggapi Aksi Demonstrasi RUU Pilkada 2024.

c. *Make Moral Judgement*

- DPR Bahas RUU Pilkada, PDIP: Bertentangan dengan Putusan MK.
- Putusan MA dan MK Jadi Perdebatan di Baleg DPR soal RUU Pilkada.
- Ikut Aksi Demo di DPR, Reza Rahardian Naik ke Mobil ke Orasi.
- Ini Alasan DPR Batalkan Revisi UU Pilkada.
- Puan Respons Dinamika Politik Soal Revisi UU Pilkada.

d. *Suggest Remedies*

- Perubahan UU Pilkada “Potong” Putusan MK?

- Datangi Massa Pendemo di DPR, Habiburokhman Terkena Lemparan.
- KPU akan Tindak Lanjuti Putusan MK Lewat Konsultasi DPR RI.
- Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada 2024.

Delapan belas konten berita yang dipeta-petakan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis *framing*. Penulis juga akan menggunakan teori analisis *framing* menurut Robert Entman dalam membedah konten berita tvOneNews. Penulis akan membedah konten berita mulai dari seleksi isu hingga aspek-aspek sesuai teori analisis *framing* Entman. Terdapat empat aspek atau elemen framing menurut Entman, yakni *define problems*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, dan *suggest remedies*. Berikut adalah rincian analisis *framing* konten berita tvOneNews sesuai teori analisis *framing* Entman.

1. Pola Pemberitaan tvOneNews dalam Menyikapi RUU Pilkada 2024

Penulis akan mengulas bagaimana media tvOneNews menonjolkan beberapa aspek dalam polemik revisi Undang-Undang Pilkada 2024 lalu. Media tvOnenews dalam tiga periode pemberitaan cenderung berimbang dan netral dalam pemberitaanya. Media tvOneNews memilih judul-judul yang bernarasi pertanyaan-pertanyaan retorika. Misal, konten berita yang berjudul “*Perubahan UU Pilkada “Potong” Putusan MK?*” dan “*Revisi Undang-undang Pilkada Beda dengan Putusan MK?*”. Selain itu, mayoritas konten berita lainnya bernarasi informatif sehingga terlihat tidak ada keberpihakan. Konten berita tvOneNews tersebut seperti konten berita yang berjudul “*Putusan MK Game Changer Pilkada*”, “*Putusan MA dan MK Jadi Perdebatan di Baleg DPR soal RUU Pilkada*”, dan “*Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada*”. Dalam pemilihan judul, tvOneNews memilih menyoroti proses RUU Pilkada 2024 pasca putusan MK.

Gambar 4. 16 Konten Berita tvOneNews Keempat



Sumber: tvOneNews, 19 April 2025

Berbeda dengan Kompas.com, media tvOneNews cukup berimbang dalam menampilkan suara-suara pihak pemerintah dan suara oposisi. Media tvOneNews mengemasnya melalui pemilihan-pemilihan narasumber yang mendukung dan narasumber yang menentang RUU Pilkada. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa konten berita yang tvOneNews tayangkan. Misal, konten berita yang berjudul "*Mahasiswa di Makasar Demo Tolak RUU Pilkada*", "*Puan Respons Dinamika Politik Soal Revisi UU Pilkada*", dan "*Presiden Jokowi Buka Suara Tanggapi Aksi Demonstrasi RUU Pilkada 2024*".

Gambar 4. 17 Konten Berita tvOneNews Kedelapan Belas



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Selain aspek pemilihan judul dan narasumber, penulis akan mengulas bagaimana penyajian video dalam konten berita tvOneNews. Media tvOneNews membungkai video yang menyoroti proses RUU Pilkada 2024 di DPR dan demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah NKRI. Misal, konten terkait proses pembahasan RUU Pilkada berjudul “*Rapat Baleg DPR Bahas Perubahan UU Pilkada*”, “*Perubahan UU Pilkada ‘Potong’ Putusan MK?*” dan “*Revisi Undang-undang Pilkada Beda dengan Putusan MK?*”. Selain itu, terdapat konten-konten terkait perlawanan terhadap RUU Pilkada yang berjudul “*Teriakan ‘Lawan’ Menggema di Depan Gedung DPR*”, “*Ikut Aksi Demo di DPR, Reza Rahardian Naik ke Mobil ke Orasi*”, dan “*Mahasiswa di Makassar Demo Tolak RUU Pilkada*”.

Gambar 4. 18 Konten Berita tvoneNews Kesembilan



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Dalam kerangka teori analisis framing Entman, strategi seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dalam pemberitaan menjadi peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Dalam memberitakan polemik RUU Pilkada 2024, tvOneNews membungkai isu tersebut secara netral dengan pendekatan yang informatif dan prosedural. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan judul yang bernuansa pertanyaan retoris seperti “*Perubahan UU Pilkada ‘Memotong’ Putusan MK?*”. Pemilihan judul seperti itu menunjukkan sikap kehati-hatian media dalam memberitakan

polemik RUU Pilkada 2024. Pembingkaian seperti ini dapat diartikan sebagai upaya tvOneNews untuk menghadirkan ruang diskusi tanpa menyudutkan salah satu pihak. Akibatnya publik diarahkan untuk melihat isu ini sebagai bagian dari dinamika hukum dan politik yang normal, bukan sebagai krisis konstitusi.

Media tvOneNews juga menampilkan keberimbangan narasi melalui pemilihan narasumber dari berbagai pihak, baik dari kalangan oposisi maupun pemerintah. Konten berita seperti “*Mahasiswa di Makassar Unjuk Rasa Tolak RUU Pilkada*”, dan “*Presiden Jokowi Angkat Bicara Tanggapi Demonstrasi RUU Pilkada 2024*” menunjukkan bahwa media ini berusaha membuka ruang untuk berbagai suara secara proporsional. Dalam penyajian konten pemberitaan disajikan sebagai dokumentasi yang netral tanpa narasi yang emosional. Misal, cuplikan proses pembahasan di DPR dan demonstrasi. Oleh karena itu, framing tvOneNews berusaha membangun citra bahwa polemik RUU Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi yang normatif.

2. Elemen-Elemen *Framing* Pemberitaan RUU Pilkada 2024 Media tvOneNews

a. *Define Problem*

Peneliti membagi tiga periode dalam pemberitaan mengenai polemik RUU Pilkada 2024. Pertama, periode awal kemunculan polemik tersebut. Pada periode awal, media tvOneNews mendefinisikan masalah RUU Pilkada sebagai dinamika politik antara elit maupun lembaga negara. RUU Pilkada dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kerangka negara demokrasi. Hal tersebut termuat dalam beberapa konten berita tvOneNews. Misal, konten berita yang berjudul “*Rapat Baleg DPR Bahas Perubahan UU Pilkada*” dan “*Revisi Undang-undang Pilkada Beda dengan Putusan MK?*”. Dalam konten ini, tvOneNews membungkai rapat Baleg DPR dengan pemerintah dan DPD RI. Rapat kerja Baleg

DPR membahas perubahan UU Pilkada. Rapat Baleg disinyalir akan menganulir putusan MK.

Gambar 4. 19 Konten Berita tvOneNews Keenam



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Kedua, periode puncak ketegangan polemik RUU Pilkada. Media tvOneNews menyampaikan hal yang berbeda. Misal, konten berita yang berjudul “*Teriakan “Lawan” Menggema di Depan Gedung DPR*”. Konten ini mendefinisikan RUU Pilkada yang menuai kontroversi. Terdapat perbedaan draf RUU Pilkada yang disusun DPR dengan putusan MK. Adanya polemik antara putusan MK dan langkah dari Baleg DPR RI membuat publik marah.

Gambar 4. 20 Konten Berita tvOneNews Ketujuh



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Ketiga, periode pasca pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024. Media tvOneNews mendefinisikan masalah RUU Pilkada sebagai produk yang tidak sesuai dengan putusan MK. Misal, dalam konten berita tersebut berjudul “*KPU Siapkan PKPU usai DPR Batalkan RUU Pilkada*”. Konten-konten tersebut membingkai RUU Pilkada yang menuai kontroversi di masyarakat. RUU Pilkada dianggap bermasalah karena menentang putusan MK. Media tvOneNews membingkai *define problems* RUU Pilkada berbeda-beda dan berusaha tetap dalam kerangka netral.

Gambar 4. 21 Konten Berita tvOneNews Kelima Belas



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Dalam kerangka teori analisis framing Entman, elemen *define problems* merujuk pada bagaimana media mendefinisikan sebuah isu sebagai masalah publik yang layak untuk diperhatikan. Dalam konteks pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024, tvOneNews membingkai pendefinisian masalah secara dinamis mengikuti perkembangan isu yang terjadi. Pada periode awal, tvOneNews mendefinisikan RUU Pilkada sebagai bagian dari dinamika politik antar lembaga negara dan elit politik yang dianggap wajar dalam sistem demokrasi. Misal, dalam konten berita yang berjudul “*Perubahan UU Pilkada ‘Memotong’ Putusan MK?*”. Polemik RUU Pilkada tidak dibingkai sebagai sebuah

krisis. Akan tetapi, media memandang RUU Pilkada sebagai bagian dari proses legislasi yang normal. Pembingkaian ini menunjukkan bahwa media cenderung meredam kesan konflik dan menjaga kesan netral di tahap awal.

Pada periode puncak ketegangan, definisi masalah bergeser. tvOneNews mulai mengangkat kontroversi yang muncul di masyarakat. Konten-konten seperti “*Teriakan ‘Lawan’ Menggema di Depan Gedung DPR*” menunjukkan bahwa masalah didefinisikan sebagai konflik terbuka antara kehendak masyarakat dengan langkah DPR. Hal tersebut menyoroti inkonsistensi norma konstitusi. Pada periode pasca pembatalan, pembingkaian definisi masalah berpusat pada substansi RUU itu sendiri yang dianggap bertentangan dengan putusan MK. Hal tersebut dapat dilihat pada berita “*KPU Siapkan PKPU usai DPR Batalkan RUU Pilkada*”. Dalam perspektif Entman, variasi pendefinisian masalah ini mencerminkan strategi framing tvOneNews yang cenderung berhati-hati dan adaptif, Selain itu, media berusaha mempertahankan posisi netral meski mengakui adanya krisis legitimasi produk legislasi.

b. *Diagnose Cause*

Peneliti membagi tiga periode dalam pemberitaan mengenai polemik RUU Pilkada 2024. Pertama, periode awal kemunculan polemik tersebut. Pada periode awal, media tvOneNews membingkai sumber masalahnya adalah perbedaan putusan MK dan putusan MA. MA dan MK berbeda pandangan berkaitan batas minimal usia pencalonan kepala daerah. Hal tersebut dapat dilihat di konten yang berjudul “*Putusan MK Game Changer Pilkada*”.

Gambar 4. 22 Konten Berita tvOneNews Pertama



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Kedua, periode puncak ketegangan polemik RUU Pilkada. Media tvOneNews menyampaikan hal yang berbeda. Misal, konten berita yang berjudul “*Mahasiswa di Makasar Demo Tolak RUU Pilkada*” dan “*Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Tetap Pakai Putusan MK*”. Dalam konten-konten tersebut, tvOneNews membingkai sumber masalah terletak pada RUU Pilkada 2024 yang tidak sesuai putusan MK.

Gambar 4. 23 Konten Berita tvOneNews Kesebelas



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Ketiga, periode pasca pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024. Media tvOneNews membingkai sumber masalah terletak pada proses pembahasan RUU Pilkada yang tergesa-gesa. Selain itu, draf

RUU Pilkada yang tidak sesuai putusan MK masih dianggap sebagai sumber masalah juga. Hal tersebut termuat dalam beberapa konten tvOneNews. Misal, konten yang berjudul “*Sufmi Dasco Datangi Polda Metro Jaya untuk Meminta Polisi Bebaskan Pendemo yang Ditahan*” dan “*Presiden Jokowi Angkat Bicara Tanggapi Demonstrasi RUU Pilkada 2024*”.

Gambar 4. 24 Konten Berita tvOneNews Keenam Belas



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Dalam kerangka teori analisis framing Entman, elemen *diagnose causes* merujuk pada bagaimana media mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah publik. Dalam memberitakan polemik RUU Pilkada 2024, tvOneNews membingkai sumber masalah yang bergeser sesuai dengan dinamika politik dalam tiga periode waktu yang berbeda. Pada periode awal, tvOneNews membingkai akar masalah terletak pada perbedaan antara putusan MK dan MA. Hal tersebut terlihat pada konten-konten seperti “*Putusan MK Game Changer Pilkada*”. Ketidakharmonisan antarlembaga hukum diposisikan sebagai penyebab utama polemik tersebut.

Pada periode puncak ketegangan, pembingkaian sumber masalah bergeser. Media tvOneNews mulai menggarisbawahi bahwa substansi

RUU Pilkada 2024 yang tidak sesuai dengan putusan MK menjadi inti permasalahan. Misal, dalam konten “*Mahasiswa di Makasar Demo Tolak RUU Pilkada*” dan “*Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Tetap Pakai Putusan MK*”. Media tvOneNews mulai membingkai penyebab konflik sebagai kegagalan DPR dalam menyelaraskan RUU tersebut dengan norma konstitusi yang sudah diputuskan MK. Pada periode pasca pembatalan, penyebab masalah dibingkai sebagai akibat dari proses legislasi yang dinilai tergesa-gesa. Selain itu, draf RUU yang tidak mencerminkan putusan MK juga masih dianggap sebagai penyebab sisa polemik. Hal tersebut terlihat pada berita “*Sufmi Dasco Datangi Polda Metro Jaya untuk Meminta Polisi Bebaskan Pendemo yang Ditahan*” dan “*Presiden Jokowi Angkat Bicara Tanggapi Demonstrasi RUU Pilkada 2024*”. Dalam perspektif Entman, perubahan pembingkaian penyebab ini menunjukkan upaya media untuk menyesuaikan arah narasi dengan perkembangan politik, dengan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan penyelenggara pemilu.

c. *Make Moral Judgement*

Peneliti membagi tiga periode dalam pemberitaan mengenai polemik RUU Pilkada 2024. Pertama, periode awal kemunculan polemik tersebut. Pada periode ini, tvOneNews membingkai melalui pernyataan-pernyataan elit. Media tvOneNews membingkai nilai moral dalam bentuk pernyataan elit-elit berkaitan polemik RUU Pilkada. Misal, dalam konten berita yang berjudul “*DPR Bahas RUU Pilkada, PDIP: Bertentangan dengan Putusan MK*” dan “*Putusan MA dan MK Jadi Perdebatan di Baleg DPR soal RUU Pilkada*”.

Gambar 4. 25 Konten Berita tvOneNews Ketiga



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Kedua, periode puncak ketegangan polemik RUU Pilkada. Media tvOneNews membingkai dengan hal yang berbeda. Media tvOneNews membingkai melalui pernyataan-pernyataan kelompok masyarakat sipil. Hal tersebut dapat dilihat dalam konten-konten tvOneNews lainnya. Misal, konten yang berjudul "*"Ikut Aksi Demo di DPR, Reza Rahardian Naik ke Mobil ke Orasi"*".

Gambar 4. 26 Konten Berita tvOneNews Kedelapan



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Ketiga, periode pasca pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024. Pada periode ini, tvOneNews kembali membingkai melalui

pernyataan-pernyataan elit. Misal, dalam konten berjudul “*Ini Alasan DPR Batalkan Revisi UU Pilkada*”.

Gambar 4. 27 Konten Berita tvOneNews Ketiga Belas



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Konten berita ini membingkai nilai moral dalam bentuk sikap tegas dan komitmen DPR yang akan patuh putusan MK sesuai prosedur. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Berikut kutipannya,

“Kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku. Bawa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora”.

Begitu juga dengan konten-konten berita tvOneNews lainnya. Konten berita tvOneNews cenderung membingkai make moral judgement dengan tokoh-tokoh lingkungan pemerintah dan bukan dari kalangan oposisi. Misal, dalam konten berita tvOneNews lain yang berjudul ”*Puan Respons Dinamika Politik Soal Revisi UU Pilkada*”.

Gambar 4. 28 Konten Berita tvOneNews Keempat Belas



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Aspek *make moral judgement* konten berita di atas dibingkai dalam pernyataan Puan berkaitan sikap tegas dan komitmen DPR yang akan selalu menjaga kepentingan negara yang lebih besar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Berikut kutipannya,

“DPR RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan-kewenangan lembaga negara, dan tetap meperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi seluruh masyarakat Indonesia”.

Dalam kerangka teori analisis *framing* Entman, elemen *make moral judgement* merujuk pada bagaimana media memberikan penilaian moral terhadap suatu isu atau aktor yang diberitakan. Dalam konteks pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024, tvOneNews menunjukkan konstruksi moral yang berubah-ubah sesuai dengan dinamika politik yang berlangsung. Pada periode awal, tvOneNews membungkai nilai moral melalui kutipan-kutipan pernyataan elit politik. Pernyataan tersebut berisi penilaian normatif terhadap putusan MK dan perdebatan legislasi di DPR.

Pada periode puncak ketegangan, pembungkai moral bergeser ke arah artikulasi suara masyarakat sipil. Media tvOneNews memberikan

ruang bagi ekspresi moral dari masyarakat, seperti pada “*Teriakan Lawan’ Menggema di Depan Gedung DPR*” dan “*Mahasiswa di Makassar Berdemonstrasi Menolak RUU Pilkada*”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa media menghadirkan penilaian moral dari perspektif gerakan kolektif masyarakat yang menolak revisi UU tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. Pada periode pasca-pembatalan, penilaian moral kembali berpusat pada narasi elit. Misal, konten berita yang berjudul “*Ini Alasan DPR Batalkan Revisi UU Pilkada*”. Dalam perspektif Entman, pergeseran penilaian moral ini menunjukkan bahwa tvOneNews menyesuaikan bingkai moralnya sesuai dengan aktor dominan yang bermain, baik dari kalangan elit maupun masyarakat sipil. Akan tetapi, tvOneNews tetap mempertahankan garis narasi yang tidak frontal terhadap kekuasaan.

d. *Suggest Remedies*

Peneliti membagi tiga periode dalam pemberitaan mengenai polemik RUU Pilkada 2024. Pertama, periode awal kemunculan polemik tersebut. Pada periode ini, tvOneNews membungkainya dalam bentuk saran yang disampaikan oleh kalangan elit. Media tvOneNews menyarankan putusan MK perlu dibahas dalam sebuah rapat. Hal tersebut termuat dalam konten berita yang berjudul “*Perubahan UU Pilkada ‘Potong’ Putusan MK?*”.

Gambar 4. 29 Konten Berita tvoneNews Kelima



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Konten ini menyarankan untuk membahas putusan MK dalam rapat. Hal tersebut dibingkai dalam pernyataan anggota Badan Legislasi, Berikut kutipannya,

“Ya kita nggak mungkin menganulir MK. Kita ingin menyadur itu biar terang benderang. Tidak ada tafsir yang liar oleh penyelenggara KPU maupun pasangan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada”.

Kedua, periode puncak ketegangan polemik RUU Pilkada. Media tvOneNews membingkai saran dalam bentuk pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024. Hal tersebut termuat dalam konten-konten berita tvOneNews lainnya. Misal, konten yang berjudul *“Datangi Massa Pendemo di DPR, Habiburokhman Terkena Lemparan”* dan *“KPU akan Tindak Lanjuti Putusan MK Lewat Konsultasi DPR RP”*.

Gambar 4. 30 Konten Berita tvOneNews Kedua Belas



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Ketiga, periode pasca pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024. Media tvOneNews membingkai saran untuk patuh pada putusan MK. Hal tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam pembentukan bingkai tvOneNews. Misal, dalam konten berita yang berjudul *“Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada 2024”*.

Gambar 4. 31 Konten Berita tvOneNews Ketujuh Belas



Sumber: tvOneNews, 18 Juni 2025

Konten ini membingkai saran untuk terus mengawal konstitusi dan proses demokrasi negara Indonesia. Konten ini membingkainya dalam bentuk tanggapan pernyataan Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Berikut adalah kutipannya,

“Terutama adik-adik mahasiswa, kami bangga sekali, dan kita doakan adik-adik terus bisa mengawal tegaknya konstitusi dan proses demokrasi Indonesia”.

Dalam kerangka teori analisis framing Entman, elemen *suggest remedies* merujuk pada bagaimana media menyarankan solusi atas masalah yang telah dibingkai. Dalam konteks pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024, media tvOneNews menampilkan saran solusi yang bersifat gradual dan adaptif sesuai dengan perkembangan situasi politik. Pada periode awal, media tvOneNews membingkai solusi melalui pendekatan procedural. Media tvOneNews menganggap perlu membahas putusan MK dalam rapat legislatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa media mengarahkan penyelesaian pada jalur formal kelembagaan tanpa mempersoalkan substansi politik dari RUU tersebut.

Pada periode puncak ketegangan, tvOneNews mulai mengakomodir saran berupa pembatalan atau penundaan pengesahan

RUU Pilkada 2024 sebagai bentuk respon atas tekanan publik. Akan tetapi, pembingkaian solusi ini masih belum menunjukkan perlawanan terbuka terhadap kekuasaan. Pada periode pasca pembatalan, tvOneNews membingkai solusi dalam bentuk kepatuhan terhadap putusan MK yang ditampilkan sebagai sikap hati-hati dalam mendukung jalannya demokrasi konstitusional. Dalam perspektif Entman, pembingkaian solusi semacam ini menunjukkan kecenderungan media untuk menjaga stabilitas institusi. Selain itu, media tetap memperhatikan tekanan publik dan menghindari mengkritik tajam secara langsung elit politik.

D. Perbandingan Konstruksi *Framing* Media Kompas.com dan tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024

Hasil analisis *framing* kedua media, yakni Kompas.com dan tvOneNews menunjukkan pembingkaian yang berbeda. Kedua media memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Pertama, perbedaan dalam segi narasi-narasi yang diciptakan. Kedua, perbedaan pemilihan narasumber dalam berita yang keduanya publikasikan. Ketiga, perbedaan dalam mengonstruksi *framing* berita tersebut. Berikut adalah analisa konstruksi framing dari media Kompas.com dan tvOneNews dalam menyajikan berita polemik RUU Pilkada 2024.

1. *Framing* Artikel Berita Kompas.com terkait RUU Pilkada 2024

Peneliti akan membagi menjadi tiga periode konstruksi framing media Kompas.com. Tiga periode yang dimaksud adalah periode awal kemunculan, puncak ketegangan, dan pasca pembatalan. Pertama, framing pemberitaan Kompas.com dalam periode awal kemunculan polemik RUU Pilkada dapat digambarkan dalam bentuk analisis tabel berikut.

Tabel 4. 3 Aspek *Framing* Artikel Berita Kompas.com Periode Awal

<i>Define Problem</i>	RUU Pilkada merupakan persoalan publik yang penting karena mengancam putusan MK.
-----------------------	--

<i>Diagnose Cause</i>	RUU Pilkada yang tidak sesuai putusan MK.
<i>Make Moral Judgement</i>	Nilai moral disajikan dalam bentuk kritik terhadap tindakan pihak-pihak terkait.
<i>Suggest Remedies</i>	Menyarankan pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024 dan menyarankan publik untuk terus mengawal putusan MK.

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 19 Juni 2025

Kedua, framing pemberitaan Kompas.com dalam periode puncak ketegangan polemik RUU Pilkada dapat digambarkan dalam bentuk analisis tabel berikut.

Tabel 4. 4 Aspek *Framing* Artikel Berita Kompas.com Periode Puncak

<i>Define Problem</i>	Penundaan pengesahan RUU Pilkada merupakan taktik meredam situasi yang memanas.
<i>Diagnose Cause</i>	RUU Pilkada yang dibahas tergesa-gesa.
<i>Make Moral Judgement</i>	Nilai moral disajikan dalam bentuk kritik terhadap tindakan pihak-pihak terkait.
<i>Suggest Remedies</i>	Menyarankan pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024 dan menyarankan publik untuk terus mengawal putusan MK.

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 19 Juni 2025

Ketiga, framing pemberitaan Kompas.com dalam periode pasca pembatalan polemik RUU Pilkada dapat digambarkan dalam bentuk analisis tabel berikut.

Tabel 4. 5 Aspek *Framing* Artikel Berita Kompas.com Periode Pasca Pembatalan Pengesahan

<i>Define Problem</i>	RUU Pilkada sebagai Kontroversi Publik yang berhasil digagalkan.
<i>Diagnose Cause</i>	RUU Pilkada yang dibahas tergesa-gesa dan tidak sesuai putusan MK.
<i>Make Moral Judgement</i>	Nilai moral disajikan dalam bentuk kritik terhadap tindakan pihak-pihak terkait.
<i>Suggest Remedies</i>	Menyarankan publik untuk terus mengawal putusan MK.

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 19 Juni 2025

Berdasarkan tabel analisis *framing* terhadap pemberitaan Kompas.com mengenai RUU Pilkada 2024, penelitian menunjukkan bahwa media ini menciptakan pembingkaian yang berpihak pada kepentingan publik dan cenderung mengambil posisi sebagai oposisi pembuat kebijakan. Pada elemen *make moral judgement* dan *suggest remedies*, Kompas.com memiliki sikap yang konsisten dalam pembingkaianya. Akan tetapi, pada elemen *define problems* dan *diagnose cause*, Kompas.com cenderung menyesuaikan konteks pemberitaan.

Model *framing* seperti ini sudah menjadi hal yang wajar dalam praktik jurnalisme kritis. Studi yang dilakukan Aziz & Wahid (2021) oleh menunjukkan bahwa media dengan orientasi independen cenderung menonjolkan dimensi konflik yang menggambarkan perlawanan dari masyarakat sipil. Dalam kasus politik dinasti pada Pilkada 2020, media seperti Kompas menciptakan *framing* pemberitaan yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan adanya politik dinasti (Aziz & Wahid, 2021). Hal tersebut mengindikasikan adanya pola keberpihakan media terhadap narasi yang mendukung perlawanan sipil.

2. *Framing* Konten Berita tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024

Peneliti akan membagi menjadi tiga periode konstruksi framing media tvOneNews. Tiga periode yang dimaksud adalah periode awal kemunculan, puncak ketegangan, dan pasca pembatalan. Pertama, framing pemberitaan tvOneNews dalam periode awal kemunculan polemik RUU Pilkada dapat digambarkan dalam bentuk analisis tabel berikut.

Tabel 4. 6 Aspek *Framing* Konten Berita tvOneNews Periode Awal

<i>Define Problem</i>	RUU Pilkada sebagai dinamika politik antara elit maupun lembaga negara.
<i>Diagnose Cause</i>	Perbedaan putusan MA dan putusan MK.
<i>Make Moral Judgement</i>	Nilai moral disajikan dalam bentuk pernyataan elit politik.
<i>Suggest Remedies</i>	Menyarankan pembahasan putusan MK dalam sebuah rapat.

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 19 Juni 2025

Kedua, framing pemberitaan tvOneNews dalam periode puncak ketegangan polemik RUU Pilkada dapat digambarkan dalam bentuk analisis tabel berikut.

Tabel 4. 7 Aspek *Framing* Konten Berita tvOneNews Periode Puncak

<i>Define Problem</i>	RUU Pilkada merupakan produk hukum yang menuai kontroversi.
<i>Diagnose Cause</i>	RUU Pilkada tidak sesuai putusan MK.
<i>Make Moral Judgement</i>	Nilai moral disajikan dalam bentuk kritik terhadap tindakan pihak-pihak terkait.
<i>Suggest Remedies</i>	Menyarankan pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024 dan patuh pada putusan MK.

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 19 Juni 2025

Ketiga, framing pemberitaan Kompas.com dalam periode pasca pembatalan polemik RUU Pilkada dapat digambarkan dalam bentuk analisis tabel berikut.

Tabel 4. 8 Aspek *Framing* Konten Berita tvOneNews Periode Pasca Pembatalan Pengesahan

<i>Define Problem</i>	RUU Pilkada sebagai produk yang tidak sesuai dengan putusan MK.
<i>Diagnose Cause</i>	Pembahasan RUU Pilkada yang tergesa-gesa.
<i>Make Moral Judgement</i>	Nilai moral disajikan dalam bentuk pernyataan elit.
<i>Suggest Remedies</i>	Menyarankan patuh pada putusan MK.

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 19 Juni 2025

Berdasarkan tabel analisis *framing* terhadap pemberitaan tvOneNews mengenai RUU Pilkada 2024, penelitian menunjukkan bahwa media ini berusaha menciptakan pembingkaian yang tidak berpihak dan mengakomodir semua suara. Pada elemen *define problems*, *diagnose cause*, *make moral judgement* dan *suggest remedies*, tvOne berusaha menyesuaikan konteks pemberitaan. Media tvOneNews selektif dalam menyuarakan dan memfokuskan isu. Oleh karena itu, terjadi pergeseran framing dengan tujuan memberikan sikap posisi netral.

3. Perbedaan Framing Kompas.com dan tvOneNews

Hasil analisis *framing* kedua media, yakni Kompas.com dan tvOneNews menunjukkan pembingkaian yang berbeda. Kedua media memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Pertama, perbedaan dalam segi narasi-narasi yang diciptakan. Kedua, perbedaan dalam mengonstruksi *framing* berita tersebut. Peneliti akan menyajikan perbedaan penyajian

framing antara Kompas.com dan tvOneNews dalam memberitakan RUU Pilkada 2024. Berikut adalah tabel perbedaan framing pemberitaan dari keduanya.

Tabel 4. 9 Aspek *Framing* Konten Berita tvOneNews

Aspek	Kompas.com	tvOneNews
Define Problems	Konsisten membingkai RUU Pilkada 2024 merupakan masalah publik yang mengancam demokrasi.	Membingkai beberapa definisi masalah RUU Pilkada sesuai konteks dan periode pemberitaan.
Diagnose Cause	Konsisten membingkai RUU Pilkada yang tidak sesuai putusan MK dan proses legislasinya tergesa-gesa.	Membingkai beberapa sumber masalah terletak pada perbedaan putusan MK dan MA, RUU Pilkada yang tidak sesuai MK, dan pembahasan RUU yang tergesa-gesa.
Make Moral Judgement	Konsisten membingkai nilai moral melalui kritik-kritik tokoh oposisi.	Membingkai beberapa nilai moral melalui elit politik dan tokoh kelompok oposisi.
Suggest Remedies	Konsisten membingkai saran berupa pembatalan pengesahan RUU Pilkada dan mengawal putusan MK.	Membingkai beberapa saran berupa pembahasan putusan MK di rapat, pembatalan pengesahan RUU Pilkada 2024, dan patuh pada putusan MK.

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 19 Juni 2025

Berdasarkan tabel perbedaan *framing* Kompas.com dan tvOneNews mengenai RUU Pilkada 2024, penelitian menunjukkan bahwa kedua media ini

menciptakan pembingkaian yang berbeda. Kedua media memilih sikap yang sedikit berbeda. Kompas.com cenderung terbuka berpihak pada kepentingan publik dan mengambil posisi sebagai oposisi pembuat kebijakan. Berbeda dengan Kompas.com, tvOneNews cenderung bersikap netral dalam memandang polemik RUU Pilkada 2024.

Bab ini telah menguraikan framing berita media polemik RUU Pilkada 2024 media online Kompas.com dan tvOneNews melalui analisis teori framing Robert Entman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap media tidak begitu saja menyajikan informasi secara netral. Akan tetapi, media secara aktif membungkai isu sesuai dengan orientasi kepentingannya. Media Kompas.com menekankan RUU Pilkada sebagai ancaman bagi demokrasi. Cara yang dilakukan Kompas.com adalah menyoroti motif politik di balik RUU Pilkada 2024 dan mendorong perlawanan masyarakat sipil. Berbeda dengan Kompas.com, media tvOneNews membungkai isu ini sebagai upaya perbaikan sistem politik secara prosedural. Media ini berusaha menggunakan pendekatan yang lebih netral dan teknokratis tanpa mengkritik aktor politik secara tajam.

Temuan ini menunjukkan bahwa teori framing Entman sangat relevan dalam mengungkap bias media di Indonesia. Pola pemberitaan dan framing masing-masing elemen informasi dalam berita tidaklah netral. Framing menjadi bentuk intervensi media terhadap arah persepsi publik. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa teori framing Entman mampu membongkar kecenderungan kepentingan media dalam konteks kontestasi wacana. Konstruksi framing tidak hanya menjadi produk jurnalisme, tetapi juga sebagai cara mengetahui posisi politik yang media pilih.

BAB V

KONSTRUKSI REALITAS POLEMIK RUU PILKADA OLEH KOMPAS.COM DAN TVONENEWS

Dalam dinamika komunikasi politik kontemporer, media tidak hanya menjadi institusi yang menyampaikan pesan. Akan tetapi, media juga menjadi bagian dari aktor yang dapat mengatur masyarakat dalam memandang realitas sosial politik. Dalam konteks ini, framing menjadi strategi pengemasan informasi oleh media dalam memainkan peran sentral dalam mengatur makna dan wacana. Media menjadi salah satu pilar demokrasi yang memiliki kekuatan dalam mereproduksi makna peristiwa, membentuk perspektif, dan mempengaruhi kesadaran publik. Media memiliki peran sentral dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa sosial dan politik. Peran media yang tidak hanya sebagai saluran penyampai informasi menjadikan media sebagai aktor penting dalam mengkonstruksi realitas sosial melalui proses *framing* (Ayomi, 2021).

Framing dapat diartikan sebagai proses penyajian informasi yang dilakukan oleh media dengan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa (Entman, 2013). Oleh karena itu, *Framing* dapat diartikan sebagai teknik pengemasan pesan yang memungkinkan khalayak untuk melihat suatu isu dari perspektif tertentu. Peristiwa politik seperti RUU Pilkada 2024 menjadi lahan subur bagi framing media. Media berperan dalam menentukan bagaimana isu tersebut dipahami oleh publik. Hal tersebut dikarenakan media dapat membangun realitas melalui framing yang media ciptakan.

Bab ini akan menyajikan hasil sintesis dan interpretasi mendalam mengenai konstruksi realitas yang dilakukan media Kompas.com dan tvOneNews dalam memberitakan polemik RUU Pilkada 2024. Media membentuk realitas sosial-politik melalui penyajian fakta, pemilihan narasumber, dan sudut pandang. Realitas yang ditampilkan oleh media seringkali bukanlah cerminan objektif dari suatu peristiwa. Akan tetapi, realitas yang ditampilkan adalah hasil dari proses seleksi dan penonjolan

informasi yang sarat akan kepentingan. Bab ini akan membahas secara terpisah bagaimana kedua media mengonstruksi realitas melalui pola-pola pembingkaian yang Kompas.com dan tvOneNews buat.

A. Konstruksi Realitas Media Kompas.com dan tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024

1. Konstruksi Realitas Artikel Berita Kompas.com terkait RUU Pilkada 2024

Analisis *framing* berita dari Kompas.com menunjukkan bahwa media ini lebih sering menampilkan narasumber dari kalangan non-pemerintah, pengamat, dan akademisi yang mempertanyakan urgensi RUU Pilkada. Dalam pemberitaan Kompas.com, suara-suara oposisi dan masyarakat sipil benar-benar diakomodasi. Selain itu, narasi-narasi yang media Kompas.com mengandung muatan pertentangan. Penonjolan aspek-aspek seperti ini menunjukkan bahwa *framing* yang diciptakan media Kompas.com berorientasi pada posisi yang berlawanan dengan pengambil kebijakan.

Hasil analisis *framing* artikel berita Kompas.com juga menunjukkan sikap yang jelas terkait RUU Pilkada. Kompas.com menyatakan sikap menentang RUU Pilkada. Hal tersebut ditunjukan dengan cara Kompas.com membingkai isi berita dalam artikel-artikelnnya. Oleh karena itu, Kompas.com secara konsisten mengonstruksi realitas atas polemik RUU Pilkada 2024 melalui strategi pembingkaian yang berpihak pada nilai-nilai konstitusional dan aspirasi masyarakat sipil.

Pada elemen *define problems*, Kompas.com membingkai polemik RUU Pilkada sebagai isu publik yang berakar dari upaya DPR untuk menganulir putusan MK yang telah mengatur batas usia pencalonan kepala daerah. Artikel-artikel Kompas.com secara intens menyoroti bagaimana polemik revisi UU ini telah memicu gelombang perlawanan publik. Melalui narasi seperti narasi yang kuat tentang keberhasilan rakyat, Kompas.com

berusaha menciptakan realitasnya. Narasi yang menampilkan dinamika pertentangan yang tajam antara aspirasi publik dengan manuver legislatif memperkuat persepsi bahwa RUU ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Pada elemen *diagnose causes*, Kompas.com menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada RUU Pilkada yang mengabaikan putusan MK dan sikap tergesa-gesa dalam membahas RUU Pilkada. Framing ini diarahkan pada indikasi adanya kepentingan politik terselubung. Melalui kutipan-kutipan tokoh-tokoh kritis seperti Bivitri, Mahfud, Ray Rangkuti, dan tokoh sipil kritis lain, Kompas.com menekankan bahwa tindakan DPR tidak hanya mencerminkan kelemahan prosedural. Akan tetapi, terdapat kegagalan moral dalam menjaga kedaulatan hukum. Pembahasan RUU yang dianggap sebagai reaksi politik atas putusan peradilan memperkuat konstruksi realitas bahwa krisis ini bukan hanya persoalan tata negara semata.

Pada elemen *make moral judgement*, Kompas.com membangun realitas *framing* yang menilai bahwa tindakan DPR dan pemerintah tidak hanya salah secara prosedural. Akan tetapi, tindakannya juga bermasalah secara etis. Kritik terbuka yang dimuat dalam artikel seperti “mempermudah aturan resmi” dihadirkan untuk membangun persepsi bahwa proses RUU Pilkada dilakukan secara tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip transparansi demokrasi. Selain itu, Kompas.com juga membingkai perlawanan publik sebagai ekspresi moral yang legal dan mengangkat posisi masyarakat sipil sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi. Pembingkai moral seperti ini memperkuat polarisasi narasi antara pihak yang dianggap penjaga kebenaran konstitusional dengan pihak yang dianggap tidak beretika.

Pada aspek *suggest remedies*, Kompas.com mengonstruksi realitas bahwa solusi dari konflik ini adalah kettaatan pada putusan MK dan pembatalan pengesahan RUU Pilkada. Media Kompas.com menekankan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, lembaga legislatif tidak memiliki legitimasi moral maupun hukum untuk mengubahnya. Selain itu, Kompas.com juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses politik dan menekankan bahwa KPU sebagai pelaksana teknis pemilu tidak boleh tunduk pada tekanan politik dari DPR. Pembingkaian solusi seperti ini tidak hanya bersifat teknis. Akan tetapi, memiliki nilai ideologis juga karena Kompas.com mendorong partisipasi publik dan menegakan supremasi hukum.

Secara keseluruhan, konstruksi realitas yang dilakukan Kompas.com terkait polemik RUU Pilkada 2024 adalah oposisi, kritis, dan pro-demokrasi. Media Kompas.com menggunakan narasi besar bahwa RUU Pilkada 2024 merupakan bentuk penyimpangan konstitusi yang harus dihentikan. Kompas.com berusaha mengedepankan suara masyarakat sipil, menekankan kesalahan moral, dan prosedural lembaga negara. Selain itu, Kompas.com menawarkan solusi yang berlandaskan hukum dan partisipasi publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kompas.com membentuk realitas yang tidak netral. Akan tetapi, Kompas.com berpihak pada nilai-nilai konstitusional dan etika politik. Hal tersebut menjadi cerminan bagaimana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membentuk realitas terhadap isu sosial politik yang sedang berlangsung.

2. Konstruksi Realitas Konten Berita tvOneNews terkait RUU Pilkada 2024

Analisis terhadap *framing* berita tvOneNews menunjukkan bahwa media ini cenderung menampilkan realitas secara berimbang dan netral. Media tvOneNews menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, baik dari elit politik, lembaga legislatif, maupun masyarakat sipil. Media

tvOneNews tidak menonjolkan atau secara eksplisit menilai salah satu pihak. Dalam pemberitaannya, tvOneNews sering menggunakan judul yang informatif atau pertanyaan retoris. Misal, “*Perubahan UU Pilkada ‘Memotong’ Putusan MK?*” dan “*Revisi UU Pilkada Beda dengan Putusan MK?*”. Pemilihan judul seperti ini memberikan kesan bahwa media tidak ingin membentuk opini secara langsung. Akan tetapi, media membuka ruang interpretasi bagi pembaca. Kontruksi realitas seperti ini menunjukkan upaya pembingkaian yang cermat dan strategis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga posisi netral dalam konstelasi politik yang sedang berlangsung.

Media tvOneNews tidak secara eksplisit menunjukkan keberpihakan pada salah satu aktor politik. Dalam beberapa kontennya, tvOneNews menampilkan pernyataan dari para elit. Misal, Presiden Jokowi, Puan Maharani, Habiburokhman, dan anggota Badan Legislasi DPR. Selain itu, tvOneNews juga memuat ekspresi dari masyarakat yang menolak RUU tersebut. Hal tersebut terlihat pada konten berita berjudul “*Mahasiswa di Makassar Unjuk Rasa Tolak RUU Pilkada*” dan “*Reza Rahardian Naik Mobil untuk Berorasi*”. Strategi ini menunjukkan bahwa tvOneNews berusaha menampilkan keseimbangan antara suara pemerintah dan oposisi. Selain itu, penyajian video yang menunjukkan proses legislasi di DPR dan aksi massa juga ditampilkan secara paralel untuk menjaga keseimbangan narasi informasi dan visual.

Pada elemen *define problems*, tvOneNews mengonstruksi realitas bahwa polemik RUU Pilkada sebagai dinamika politik yang wajar terjadi dalam sistem demokrasi. Pada tahap awal, media ini mendefinisikan masalah sebagai perbedaan pendapat antara lembaga yudikatif (MK dan MA) dan antara DPR dengan konstitusi. Media tvOneNews tidak secara langsung menyebut langkah DPR tersebut sebagai pelanggaran konstitusi. Akan tetapi, menunjukkan bahwa RUU Pilkada merupakan bagian dari proses politik

yang sah. Pada periode puncak ketegangan, media ini mulai menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara draf RUU dan putusan MK telah memicu protes publik. Pada tahap pasca-pembatalan, masalah didefinisikan sebagai akibat dari proses legislasi yang tergesa-gesa dan tanpa persiapan, tanpa memperkuat kesan bahwa DPR telah melakukan pelanggaran konstitusional secara eksplisit.

Pada elemen *diagnose cause*, tvOneNews mengonstruksi realitas sumber masalah secara bertahap. Pada periode awal, penyebab polemik dilihat dari kesimpangsiuran penafsiran antara MA dan MK. Pada periode puncak ketegangan, sumber masalah bergeser pada isi draf RUU yang dianggap tidak sejalan dengan putusan MK. Akan tetapi, pembingkaian penyebab ini tidak diarahkan kepada aktor tertentu seperti DPR. Media tvOneNews memilih lebih menekankan pada situasi yang kompleks. Pada tahap pasca pembatalan pengesahan, tvOneNews membungkai proses pembahasan yang tergesa-gesa dan ketidaksiapan substansi sebagai penyebab utama pembatalan. Penyebab konflik tersebut terstruktur secara administratif dan prosedural, bukan dari sisi pelanggaran etika atau konstitusi.

Pada elemen *make moral judgement*, tvOneNews membungkai penilaian tersebut dengan hati-hati dan cenderung institusional. Moralitas tidak ditampilkan sebagai konflik antara benar dan salah secara ideologis. Akan tetapi, moralitas ditampilkan sebagai bagian dari penilaian terhadap proses legislasi dan respon publik. Di satu sisi, tvOneNews menampilkan pernyataan elit yang mendukung pembahasan RUU tersebut. Di sisi lainnya, tvOneNews juga memberikan ruang bagi suara publik yang menolak revisi tersebut. Misal, nilai moral dalam pemberitaan mengenai aksi demonstrasi. Nilai moral yang ditampilkan bukan berupa kritik keras terhadap DPR, tetapi legitimasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tvOneNews berusaha menghindari framing yang

menghakimi. Selain itu, tvOneNews lebih memposisikan diri sebagai pengamat realitas politik yang dinamis.

Pada elemen suggest remedies, tvOneNews mengonstruksi solusi secara bertahap dan kompromistik. Pada periode awal, solusi yang ditawarkan adalah membahas secara seksama putusan MK melalui rapat legislatif. Pada periode puncak, tvOneNews mulai memberikan ruang bagi opsi penundaan pengesahan RUU demi meredam keresahan masyarakat. Pada periode pasca pembatalan pengesahan, solusi yang ditampilkan adalah kepatuhan terhadap putusan MK. Oleh karena itu, saran penyelesaian yang dibingkai oleh tvOneNews bersifat administratif dan procedural. Saran tidak mengandung muatan ideologis yang tajam dan tetap menjaga stabilitas lembaga negara.

Secara keseluruhan, konstruksi realitas yang dibangun tvOneNews terkait polemik RUU Pilkada 2024 bersifat netral, berimbang, dan cenderung elitis. Media tvOneNews tidak menunjukkan posisi oposisi yang kuat terhadap kekuasaan. Akan tetapi, tvOneNews memilih untuk menampilkan perbedaan pendapat sebagai dinamika politik yang wajar. Strategi pembingkaian ini menunjukkan kehati-hatian dalam menyikapi isu-isu sensitive. Selain itu, hal tersebut mencerminkan posisi tvOneNews sebagai media yang mengedepankan keseimbangan narasi ketimbang konfrontasi. Oleh karena itu, realitas yang dibentuk oleh tvOneNews bukanlah realitas yang mempertajam konflik. Media tvOneNews berusaha membangun realitas yang mendamaikan ketegangan antara elit dan publik melalui narasi-narasi yang moderat dan prosedural. Pembingkaian seperti ini menunjukkan bahwa media juga dapat berperan sebagai stabilisator wacana publik, tidak melulu sebagai pengkritik kekuasaan.

B. Perbandingan Konstruksi Realitas Kompas.com dan tvOneNews dalam Pemberitaan RUU Pilkada 2024

1. Perbedaan Konstruksi Realitas Media Kompas.com dan tvOneNews dalam Framing RUU Pilkada 2024

Hasil analisis konstruksi realitas kedua media, yakni Kompas.com dan tvOneNews menunjukkan realitas yang sedikit berbeda. Kedua media memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Pertama, perbedaan dalam segi narasi-narasi yang diciptakan. Kedua, perbedaan dalam mengonstruksi realitas tersebut. Peneliti akan menyajikan perbedaan realitas yang dibangun antara Kompas.com dan tvOneNews dalam memberitakan RUU Pilkada 2024. Berikut adalah tabel perbedaan konstruksi realitas pemberitaan dari keduanya.

Tabel 4. 10 Aspek *Framing* Konten Berita tvOneNews

Aspek	Kompas.com	tvOneNews
Penyajian	Judul tegas dan sikap menentang.	Judul retoris dan sikap netral.
Narasumber	Dominan oposisi dan masyarakat sipil.	Berimbang antara oposisi dan sipil dengan elit dan pemerintah.
Gaya Framing	Kritis dan pro demokrasi.	Netral dan prosedural.
Define Problems	RUU Pilkada bermasalah karena tidak sesuai putusan MK dan kehendak rakyat.	Perbedaan antar lembaga negara serta proses legislasi biasa.
Diagnose Cause	Penyimpangan hukum dan motif politik elit.	Perbedaan tafsir MA dan MK serta ketergesaan proses legislasi
Make Moral Judgement	Menyuarkan nilai-nilai demokrasi.	Menghindari penilaian moral ekstrem.
Suggest Remedies	Pembatalan RUU Pilkada dan mengakomodasi suara	Bahas kembali di DPR dan mematuhi putusan MK

	publik.	setelah pengesahan.	pembatalan
--	---------	---------------------	------------

Sumber: Data Pribadi, diolah pada 18 Juni 2025

Berdasarkan tabel perbedaan konstruksi realitas Kompas.com dan tvOneNews mengenai RUU Pilkada 2024, penelitian menunjukkan bahwa kedua media ini menciptakan realitas yang berbeda. Kedua media memilih sikap yang sedikit berbeda. Kompas.com cenderung mengonstruksi realitas bahwa RUU Pilkada merupakan ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Berbeda dengan Kompas.com, tvOneNews cenderung mengonstruksi realitas bahwa RUU Pilkada merupakan perbedaan tafsir MA dan MK serta bagian dari proses dinamika politik.

Konstruksi realitas dalam pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024 dapat diartikan sebagai cerminan posisi ideologi dan orientasi masing-masing media. Media Kompas.com menampilkan sikap kritis terhadap kekuasaan dengan menonjolkan suara masyarakat sipil dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Misal, partisipasi publik dan ketiaatan terhadap konstitusi. Berbeda dengan Kompas.com, media tvOneNews cenderung menampilkan pemberitaan yang netral dan hati-hati. Melalui pemberitaan yang menampilkan pandangan dari kedua belah pihak. Gaya pemberitaan tvOneNews menunjukkan pendekatan yang netral dan prosedural serta menghindari konfrontasi langsung dengan kekuasaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap media membentuk realitas sesuai dengan perspektif, nilai, dan kepentingan yang mereka pegang.

Teori Entman membantu menjelaskan bagaimana media mengonstruksi realitas sosial melalui empat elemen framing yang saling berkaitan. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa bias media di Indonesia tidak selalu eksplisit. Akan tetapi, bias juga terbungkus dalam penyajian narasi yang dominan, pemilihan narasumber, dan pembingkaiyan yang dipakai. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa teori *framing* Entman mampu membongkar kecenderungan kepentingan media dalam

konteks kontestasi wacana. Konstruksi framing dan realitas tidak hanya menjadi produk jurnalisme, tetapi juga sebagai cara mengetahui posisi politik yang media pilih.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *framing* antara media Kompas.com dan media tvOneNews dalam membingkai polemik RUU Pilkada 2024. Media Kompas.com secara konsisten berfokus pada kritik terhadap rencana revisi tersebut. Media Kompas.com memberikan ruang yang luas pada pihak oposisi dan masyarakat sipil. Selain itu, Kompas.com menyoroti potensi kemunduran demokrasi dan pemusatan kekuasaan. Oleh karena itu, Kompas.com cenderung menggunakan *framing* kritis. Berbeda dengan Kompas.com, media tvOneNews cenderung memberitakan berita dengan cara yang lebih netral dan birokratis. Media tvOneNews menyoroti pernyataan resmi dari pemerintah serta tidak menampilkan kritik tajam terhadap pihak terkait. Akan tetapi, tvOneNews juga menyoroti suara pihak-pihak oposisi. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan *framing* yang lebih netral dan prosedural pada media tvOneNews.

Framing tidak dapat dilepaskan dari konstruksi realitas. Dalam pemberitaan polemik RUU Pilkada 2024, media Kompas.com dan tvOneNews mengonstruksi realitas melalui framing pemberitaannya. Media Kompas.com menampilkan realitas Kompas.com cenderung mengonstruksi realitas bahwa RUU Pilkada merupakan ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Berbeda dengan Kompas.com, tvOneNews cenderung mengonstruksi realitas bahwa RUU Pilkada merupakan perbedaan tafsir MA dan MK serta bagian dari proses dinamika politik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap media membentuk realitas sesuai dengan perspektif, nilai, dan kepentingan yang mereka pegang.

B. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini perlu diketahui agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya menganalisis dua media online. Kedua media tersebut adalah media Kompas.com dan tvOneNews. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mewakili seluruh spektrum media massa di Indonesia. Kedua, pendekatan yang digunakan mengacu pada analisis framing model Entman dengan fokus pada empat elemen framing. Model ini dianggap tidak sepenuhnya menangkap dinamika produksi berita di ruang redaksi. Penelitian ini lebih banyak menggambarkan produk akhir berita daripada proses pembentukannya.

Keterbatasan penelitian ini membuka sejumlah celah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan terkait analisis framing dan relasi kuasa media dalam konteks dinamika politik, khususnya RUU Pilkada 2024. Pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan memasukkan lebih banyak jenis media online. Misal, media lokal hingga platform media sosial seperti Twitter (X). Hal tersebut penting untuk menangkap dinamika pembingkaian yang lebih luas dan melihat bagaimana aktor di luar arus media utama turut membingkai isu revisi UU Pilkada.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat mendalami proses produksi berita di ruang redaksi. Misal, penelitian dengan menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara terhadap editor dan jurnalis. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana pengaruh tekanan politik, ideologi maupun ekonomi terhadap keputusan framing pemberitaan. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana framing media memberikan pengaruh terhadap opini atau persepsi publik. Misal, melakukan survei atau analisis sistematis terhadap komentar pembaca. Hal tersebut akan membuka ruang untuk melihat efektivitas framing dan sejauh mana media mampu membentuk atau mempengaruhi persepsi khalayak umum. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat membuat penelitian lanjutan mengenai framing media dapat dikembangkan ke arah yang lebih kontekstual, komprehensif, dan

kritis. Selain itu, penelitian lanjutan dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. M. (2024). Analisis Framing Konten Youtube Podcast Close the Door Terkait Film Dokumenter Netflix “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso.” *Jurnal Visi Komunikasi*, 23(01), 66–74.
- Agustiani, R., Umran, L. M., & Iba, L. (2020). Analisis Framing Berita Politik Pemilihan Presiden Tahun 2019 pada Media Online Zonasultra.com. *Convergence : Jurnal Online Jurnalistik*, 2(1), 52–63.
- Ahmad, D., Prisanto, G. F., Ernungtyas, N. F., & Putri, S. A. (2021). Bingkai Sara Dalam Berita Politik : Analisis Framing Berita Pengangkatan Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan RI. *Ganaya:Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 40–53.
- Aji, H. K., & Sardjono, H. S. (2021). KONSTRUKSI MEDIA DALAM 100 HARI PEMERINTAHAN JOKOWI PERIODE KE- 2 (Analisis Framing pada Kanal Youtube detikcom dan tempodotco). *Research Fair Unisri*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4565>
- Al-Hakim, L. (2020). *Konstruksi Realitas Simbolik Makna "Islam Damai dalam Program Damai Indonesiaku TvOne*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aliffah, N. C. (2018). Konstruksi Pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id Analisis Framing Kinerja 100 Hari Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. In *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Anjabi, M. J. P. S., & Anwari. (2024). ANALISIS FRAMING KAMPANYE CAPRES 2024 PADA CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB EPISODE 3 BACAPRES BICARA GAGASAN Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kebutuhan pribadi mereka , termasuk kebutuhan informasi politik , hiburan , atau. *Spektra Komunika*, 4(1), 36–57.
- Ariansyah, M. (2023). Analisis Framing Media Online tentang Pemberitaan Program

Formula E Gubernur Anies Baswedan. In *Universitas Lampung*.

- Ayomi, H. V. (2021). Analisis Framing Media Online Mengenai Pemberitaan Deklarasi Beny Wenda. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 03(03), 118–125. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/732%0Ahttps://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/732/555>
- Aziz, A., & Wahid, U. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Media Online Kompas.Com dan Okezone.Com. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.5.1.1-10>
- Barokah, A. S., Hendra, G., & Noorikhsan, F. F. (2023). New Social Media dan Imagologi Politik Analisis Framing terhadap Konten Politik pada Kanal Youtube Dedi Mulyadi Periode 2021. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 85–103. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.121>
- Curran, J., & Seaton, J. (2010). *Power Without Responsibility* (7th-th ed.). Routledge: Taylor & Francis Group.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Entman, R. M. (2013). Projections of Power. In *Projections of Power*. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226210735.001.0001>
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (VI). LKiS.
- Farida, L., & Yoedtadi, M. G. (2019). Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 pada Medcom.id). *Koneksi*, 3(2), 358–365. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6395>

Fauziati, C. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Media Daring tentang Citra Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Kompas.com dan Detik.com). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 24(2), 207–222. <https://doi.org/10.20422/jpk.v24i2.739>

Gramedia, K. (n.d.). *Kompas Gramedia*. Kompasgramedia.Com. Retrieved April 5, 2025, from <https://www.kompasgramedia.com/>

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (I). Badan Penerbit UNM.

Hasan, I., & Fathan, F. (2020). Analisis Framing Berita Politik Menjelang Pilkada Klaten Tahun 2020 Pada Solopos.Com. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 1(2), 479–500. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v1i2.2726>

Herianto, & Lutfi, M. (2020). *Realitas, Fungsi dan Eksistensi Media sebagai Aktor Politik* (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2022). Analisis Framing Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Media CNN Indonesia. *Medium*, 6(2), 167–184.

Kompas.com. (n.d.). *About Us-Kompas.com*. Kompas.Com. Retrieved April 5, 2025, from <https://inside.kompas.com/about-us>

MAHKAMAH AGUNG. (2024). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024*.

MAHKAMAH KONSTITUSI. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024* (Issue 17).

Maulana, A. H., & Prasetijowati, T. (2022). Analisis Bisnis Media Online “Kompas.Com.” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper “Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi” PSGESI LPPM UWP*, 9(01), 223–232. <https://doi.org/10.38156/gesi.v9i01.148>

- Maylani, T., & Nugroho, A. A. (2023). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6103>
- Noerdin, S., Setiawan, A., & Harmonis. (2023). DAMPAK PRAKTIK KONGLOMERASI MEDIA TERHADAP INDEPENDENSI DAN KEBEBASAN PEMBERITAAN MEDIA DI INDONESIA: STUDI KASUS PEMBERITAAN PILPRES 2014 & 2019 DI TV ONE DAN METROTV. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 214–224. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i3.242>
- Nugroho, A. (2023). Konvergensi Ruang Redaksi TV One Menghadapi Era Media Baru. *Digicommive: Jurnal of Communication Creative Studies, and Digital Culture*, 1(1), 71–81. <https://digicommive.com/JCCSDC/article/view/120/40>
- Nurhayati, Zelfia, & Idris. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Kesetaraan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Pada Media Online Magdalene . Co Edisi Juli-September 2023. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 5(2), 11–22.
- Pamuji, E. (2019). Media Cetak vs Media Online (Perspektif Manajemen dan Bisnis Media Massa). In *Unitomo Press* (1st ed.). Unitomo Press.
- Pradana, M. D., Argenti, G., & Adiarsa, S. R. (2023). Analisis Framing mengenai Pemberitaan Buzzer Politik di Media Sosial pada Media Online detikcom. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5736–5747. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Puspianto, A. (2022). Media Massa dan Pembentukan Opini publik. *An-Nida: Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, X(1), 1–22.
- Putri, I. M., & Qurniawati, E. F. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Pentutpan TikTok Shop pada Portal Berita cnnindonesia.com dan Republika.co.id. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi*, 9(4), 30–42.

- Ramadhan, D. A., Sakinah, S. N. H., & Kusumadinata, A. A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Narasi tentang Tragedi Kanjuruhan Malang. *Karimah Tauhid*, 2(1), 51–59.
- Saeni, E. (2024). Analisis Framing Robert N. Entman pada Pemberitaan Sivitas Akademika Mengritik Sikap Presiden Jokowi pada Pemilu 2024 di Media Online (kompas.com, detik.com, dan republika.co.id). *DIGICOMMATIVE: Journal of Communication Creative and Digital Culture*, 2(1), 31–45.
- Siagian, P., & Ritonga, M. U. (2024). Analisis Framing Dalam Pemberitaan Politik di tvonenews.com (Studi Kasus Pemilihan Presiden 2024). *Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(2), 126–139.
<https://doi.org/10.62383/filosofi.v1i2.96>
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.1>
- Sugiyono, D. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Suhanda, D., Huda, U. N., & Rosidin, U. (2024). Politik Legislasi: Studi terhadap Kepentingan Politik dalam Penetapan Regulasi di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 22–33. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.880>
- Thompson, J. B. (1990). *Ideology and Modern Culture* (I). Polity Press.
- TvOneNews. (2025a). *Tentang TvOne*. Tvonews.Com.
<https://www.tvonenews.com/tentang-tvone>
- TvOneNews. (2025b). *Tentang TvOneNews*. Tvonews.Com.
<https://www.tvonenews.com/tentang-kami>
- Umam, K., Ashari, & Amalia, R. A. (2023). Rekonstruksi Prinsip Check and Balances

Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila. *Jatiswara*, 38(2), 185–197.

Wibisono, D. J. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada Kompas.com dan Tempo.co. *Jurnal Politique*, 4(1), 85–99. <https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.1.85-99>

Yusuf, A. M. (2014). METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. In *KENCANA*.

Lampiran 1 Link Artikel Berita Kompas.com

1. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/20/21162081/dapat-informasi-baleg-bahas-ruu-pilkada-pdi-p-jangan-coba-permainkan?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
2. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/15504711/fraksi-pdi-p-sebut-pembahasan-ruu-pilkada-bertentangan-dengan-putusan-mk?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
3. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/16002181/mk-tak-boleh-komentari-soal-pembahasan-ruu-di-dpr?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
4. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/17122191/dpr-kebut-bahas-ruu-pilkada-untuk-lawan-putusan-mk-bivitri-kegilaan-yang?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
5. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/19054751/ruu-pilkada-yang-anulir-putusan-mk-akan-disahkan-besok-dalam-rapat-paripurna?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
6. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/19244561/dpr-setuju-ruu-pilkada-untuk-anulir-putusan-mk-hanya-pdi-p-yang-menolak?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
7. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/13231711/jokowi-bahas-tambang-di-istana-saat-rakyat-demo-kawal-putusan-mk?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile

8. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/22/14045831/pengesahan-ruu-pilkada-ditunda-ketua-bem-ui-hanya-untuk-meredam?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
9. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/15063011/paripurna-pengesahan-ruu-pilkada-ditunda-ray-rangkuti-itu-taktik-agar-adem?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
10. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/16154791/mahasiswa-yang-demo-di-dpr-saling-mengingatkan-hati-hati-provokasi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
11. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/16401781/kecurigaan-publik-kian-memuncak-usai-dpr-tunda-pengesahan-ruu-pilkada?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
12. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/19201581/dasco-bantah-dpr-batal-sahkan-ruu-pilkada-karena-eskalasi-demo?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
13. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/19221311/perlawanan-sehari-kawal-putusan-mk-ruu-pilkada-batal-disahkan?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
14. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/23/16350171/perlawanan-rakyat-sukses-buat-ruu-pilkada-batal-disahkan-mahfud-rakyat-tak?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile
15. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/24/05300041/keraguan-publik-atas-janji-kpu-patuhi-putusan->

[mk?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile](#)

16. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/24/10493841/publik-diminta-jangan-mau-dininabobkan-dpr-kpu-tetap-kawal-putusan-mk?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
17. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/26/16023501/ombudsman-temukan-pelanggaran-pengamanan-aksi-demonstrasi-penolakan-ruu?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
18. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/30/15292061/isu-ruu-perampasan-aset-dianggap-serangan-balik-jokowi-usai-dpr-gagal?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile

Lampiran 2 Link Konten Berita tvOneNews

1. <https://youtu.be/OHIuLJ7UOuk?si=jY57d1DIYO6hAUOg>
2. https://youtu.be/JpU_QC1See8?si=lVxivnM-RsorApDI
3. <https://youtu.be/aRFbz2bcFcA?si=Lc7x2y4P7tyEeqUC>
4. https://youtu.be/JQYqso-qRIY?si=LxL6VxIDe_WkmfL
5. <https://youtu.be/jDIobYgLI34?si=v3wHZVZIS9fStel7>
6. <https://youtu.be/jDIobYgLI34?si=f461q2arVKIByvGn>
7. <https://youtu.be/Ih1TKdy1fBg?si=bSxHTXzz3QxIn8S>
8. <https://youtu.be/ObGnBqmMrIc?si=gjVn1pjyHaNEzplb>
9. <https://youtu.be/s7XESZg0KUo?si=BVuuihwdqv--w5f7>
10. https://youtu.be/LwQPH3gF9Ag?si=W2_8Y3kTJdWRQWYe
11. <https://youtu.be/dUZv73NtqwU?si=dqzFKBa4KL5HtjuE>
12. https://youtu.be/yPwPnaemv_Q?si=zBS2ITMJAM6VCxbu
13. <https://youtu.be/95eXeSvW5ds?si=v468nmcmD3L8hEod>
14. <https://youtu.be/UIQVdyZ3SRM?si=4Ba56OT3xcxBICJG>

15. <https://youtu.be/J3IPoojqAnA?si=MAzrveMSF13-iaw7>
16. <https://youtu.be/NYG4Avq1hX8?si=OFFXPRzZb1OWpViw>
17. <https://youtu.be/zQgsWWh2FZw?si=TQRGvVhf1e18BM3p>
18. https://youtu.be/I8nclNJR3vY?si=zXkNNp-20h_FveN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahsanul Amal

Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang/12 April 2004

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Jalan Jatigrowong, RT. 008/RW. 002, Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

Riwayat Pendidikan

- : 1. MI Nurul Ulum Pegiringan (2009-2015)
- 2. SMP N 1 Randudongkal (2015-2018)
- 3. SMA N 1 Pemalang (2018-2021)
- 4. UIN Walisongo Semarang (2021-2025)